

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

# P-RENSTRA



## DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024-2026

## **KATA PENGANTAR**

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2024.

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2024 – 2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2024 – 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dalam rangka mendukung kepemimpinan Kepala Daerah pada masa transisi dan meneruskan kebijakan pembangunan Nasional.

Untuk mendukung arah kebijakan Pembangunan Nasional dan menghadapi isu-isu strategis, maka Dinas Kesehatan akan melakukan peningkatan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat. Hal ini diawali dengan penerapan pengelolaan keuangan BLUD pada 22 Unit Pelaksana Tugas (UPT) Puskesmas dan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu (Syamrabu) di Kabupaten Bangkalan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran :

1. Meningkatnya mutu pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan kesehatan

Dan arah kebijakan yang akan dilakukan adalah:

1. Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan
3. Optimalisasi pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
5. Mengoptimalkan efektifitas dan kualitas penatausahaan serta pelayanan penunjang perangkat daerah

Menjadi harapan kita bersama bahwa Renstra Dinas Kesehatan ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Bangkalan, 16 Desember 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANGKALAN**



**Hj. NUR HOTIBAH, S.ST.Bd.M.MKES**

Pembina Tk. I

NIP. 19700709 199102 2 001

## DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN**

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan	8
2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan	52
2.2.1. Tenaga Kesehatan	52
2.2.2. Sarana Kesehatan	54
2.3 Kinerja Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan	55
2.3.1. Derajat Kesehatan	55
2.3.2. Program Pokok dan Sasaran Kegiatan Pembangunan Kesehatan	55
2.3.3. Pelayanan Kesehatan Masyarakat	67
2.3.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM)	73
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	76

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN**

3.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan	78
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	79
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	84
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	86
1. Analisa Lingkungan Internal	88
2. Analisa Lingkungan Eksternal	89
3. Analisa SWOT	89

<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN</b>	
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan	90
4.1.1. Tujuan	91
4.1.2. Sasaran	91
4.2. Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan	92
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN</b>	
5.1 Strategi	140
5.2 Kebijakan	140
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	144
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	220
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	245

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2022	56
Tabel 2.2.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 - 2022	64
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026	91
Tabel 4.2.	Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026	92
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan	142
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026	156
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD	220
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan	222

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Peta Kabupaten Bangkalan	8
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan	51

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 dilakukan atas dasar Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 disusun berdasar pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2024 – 2026, dan Surat Edaran Bupati Bangkalan Nomor 100.3.4.2/6876/433.201/2024 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026.

Pedoman penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan disusun berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2024. Penyusunan Renstra juga berpedoman pada Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Renstra Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standard Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

#### **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
  - g. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10)
  - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan RPJMD;
- o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 6/E);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No 12 Tahun 2010 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1/D) ;
- s. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);
- t. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E)

- u. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 4/E)

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. MAKSUD**

Melakukan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dimaksudkan untuk membuat pedoman dan arah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan kesehatan agar seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan dan jajarannya dalam jangka waktu tahun 2024-2026 dapat terlaksana dengan efektif, efisien dan terukur. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

#### **1.3.2. TUJUAN**

Sedangkan tujuan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini bersifat uraian secara umum Latar Belakang Renstra, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN**

Bab ini berisi uraian gambaran secara umum tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja

Pelayanan (termasuk capaian SPM), dan kelompok sasaran layanan Dinas Kesehatan

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN**

Bab ini berisi uraian dalam mengidentifikasi permasalahan pelayanan (berdasarkan capaian kinerja), telaahan tujuan, sasaran, dan program prioritas daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN**

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN**

Bab ini berisi tentang Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Dinas Kesehatan.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN**

Bab ini berisi penjelasan tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, serta Pendanaan Indikatif dalam periode tahun 2024 – 2026,

**BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi mengenai penentuan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD serta penentuan Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan

**BAB VIII: PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Rencana Strategis (Renstra ) Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan tahun 2024 - 2026 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan rencana strategi dimasa yang akan datang.

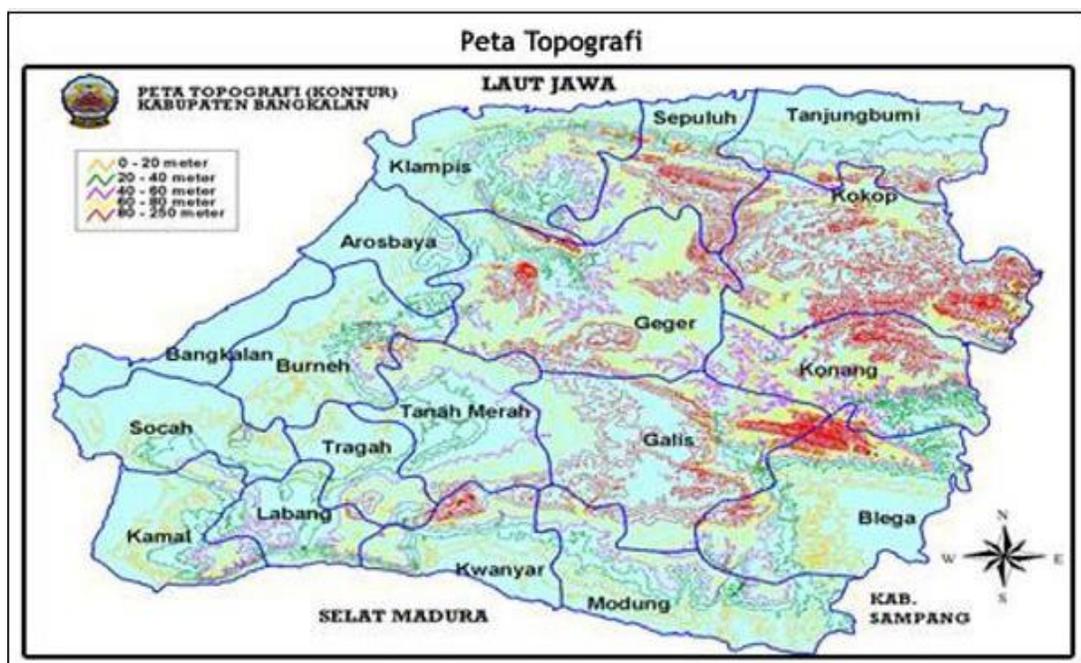
## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten yang secara geografis berada di Provinsi Jawa Timur Bagian Utara dan merupakan Pintu Gerbang menuju Pulau Madura. Luas wilayah Kabupaten Bangkalan adalah 1.260,14 Km<sup>2</sup> yang terletak di antara koordinat 112° 40'6" - 113° 08'04" Bujur Timur serta 6°51'39" - 7°11'39" Lintang Selatan. Sementara itu, jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan sebanyak 1.003.188 jiwa yang terdiri dari 479.078 penduduk laki-laki dan 524.110 penduduk perempuan. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Bangkalan mencapai 796.1 jiwa/Km<sup>2</sup>, dimana kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Bangkalan sebesar 2485,2 jiwa/Km<sup>2</sup> sedangkan kepadatan penduduk terendah berada pada Kecamatan Kokop sebesar 504,7 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Berdasarkan geografi Kabupaten Bangkalan terbagi atas 18 Kecamatan, 273 Desa dan 8 kelurahan. Sementara itu, berdasarkan letak geografis dan secara eksistensial Kabupaten Bangkalan berada di bagian paling barat dari pulau Madura dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kabupaten Sampang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Selat Madura
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Selat Madura



Gambar 1. Peta Kabupaten Bangkalan

## **2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan dapat dijabarkan sebagai berikut :

### **1. Tugas**

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang kesehatan.

### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan daerah bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang kesehatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, maka ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas dan fungsi serta tata kerja, meliputi:

#### **A. Kepala Dinas**

#### **B. Sekretariat**

Tugas : memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kesehatan

- Fungsi: - pelaksanaan penyusunan program kerja sekretariat;
- pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran bidang kesehatan;
  - pembinaan dan pemberi dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
  - pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

- pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- pengelolaan barang milik daerah;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**(1). Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas :**

- melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di seluruh unit kerja Dinas Kesehatan;
- melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di seluruh unit kerja Dinas Kesehatan;
- melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di seluruh unit kerja Dinas Kesehatan;
- melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
- melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik bidang kesehatan;
- melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh unit kerja Dinas Kesehatan;
- melakukan penyusunan laporan kinerja Dinas Kesehatan;
- melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

**(2). Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:**

- melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;

- melakukan urusan perbendaharaan pengelolaan penerimaan daerah bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah ,membayar;
- melakukan urusan gaji pegawai;
- melakukan administrasi keuangan;
- melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- melakukan penyusunan laporan keuangan;
- melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

**(3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :**

- melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah;

- melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- melakukan telaah dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

### **C. Bidang Kesehatan Masyarakat**

Tugas : melaksanakan, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga.

Fungsi: - pelaksanaan penyusunan program kerja kesehatan masyarakat;

- penyiapan perumusan kebijakan operasional bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- pelaksanaan koordinasi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;

- pelaksanaan bimbingan teknik dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- pemantauan evaluasi, dan pelaksanaan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**(1). Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, mempunyai tugas :**

- menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- menyiapkan bahan rumusan kebijakan program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
- menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
- menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap di bidang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
- menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi

- dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
- menyiapkan bahan koordinasi tentang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
  - melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  - melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

**(2). Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :**

- menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan,

- advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - menyiapkan bahan koordinasi di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  - melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

**(3). Seksi Kesehatan Lingkungan , Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas :**

- menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kesehatan Lingkungan , Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan

okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;

- menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
- menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
- menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
- menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
- menyiapkan bahan koordinasi tentang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;

- menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
- melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

#### **D. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

Tugas : merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Fungsi: - pelaksanaan penyusunan program kerja di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans, epidemiology dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonatik, dan penyakit tidak menular upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, epidemiology dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonatik, dan penyakit tidak menular upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- pelaksanaan koordinasi di bidang bidang surveilans, epidemiology dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonatik, dan penyakit tidak menular upaya

kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);

- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang surveilans, epidemiology dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonatik, dan penyakit tidak menular upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang surveilans, epidemiology dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonatik, dan penyakit tidak menular upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

**(1). Seksi Surveilans dan Imunisasi, mempunyai tugas :**

- menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa;
- menyiapkan bahan rumusan kebijakan program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa dan bencana di bidang kesehatan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa dan bencana di bidang kesehatan;
- menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa dan bencana di bidang kesehatan;
- menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa dan bencana di bidang kesehatan;

- menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa dan bencana di bidang kesehatan;
- menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas sektor tentang program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa dan bencana di bidang kesehatan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa dan bencana di bidang kesehatan;
- melaksanakan bimbingan dan pengendalian faktor resiko, pendayagunaan sumber daya dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji;
- melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

**(2). Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, mempunyai tugas :**

- menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;
- menyiapkan bahan rumusan kebijakan program pencegahan dan pengendalian penyakit penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;
- menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program

- pengecehan dan pengendalian penyakit penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;
- menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pengecehan dan pengendalian penyakit penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;
  - menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pengecehan dan pengendalian penyakit penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;
  - menyiapkan bahan koordinasi tentang program pengecehan dan pengendalian penyakit penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;
  - menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pengecehan dan pengendalian penyakit penyakit menular langsung serta tular vektor dan zoonotik;
  - melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  - melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

**(3). Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, mempunyai tugas :**

- menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pengecehan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, kecelakaan lalu lintas dan tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- menyiapkan bahan rumusan kebijakan program pengecehan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, kecelakaan lalu

lintas dan tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);

- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, kecelakaan lalu lintas dan tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, kecelakaan lalu lintas dan tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, kecelakaan lalu lintas dan tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, kecelakaan lalu lintas dan tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- menyiapkan bahan koordinasi tentang program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, kecelakaan lalu lintas dan tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);

- menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, kecelakaan lalu lintas dan tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

#### **E. Bidang Pelayanan Kesehatan**

Tugas : merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi bidang Pelayanan Kesehatan primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.

- Fungsi :
- pelaksanaan penyusunan program kerja bidang pelayanan kesehatan;
  - penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan terbuka, pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan kesehatan;
  - penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan terbuka, pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan kesehatan;
  - pelaksanaan koordinasi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan terbuka, pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan kesehatan;
  - pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan terbuka, pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan kesehatan;

- pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan terbuka, pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan kesehatan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsi.

**(1). Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, mempunyai tugas :**

- menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya diantaranya ponkesdes di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan termasuk di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi;
- menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan tentang program pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya diantaranya ponkesdes di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan termasuk di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya diantaranya ponkesdes di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan termasuk di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi;
- menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya diantaranya

ponkesdes di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan termasuk di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi;

- menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya diantaranya ponkesdes di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan termasuk di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi;
- menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya diantaranya ponkesdes di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan termasuk di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi;
- menyiapkan bahan koordinasi tentang program pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya diantaranya ponkesdes di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan termasuk di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya diantaranya ponkesdes di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan termasuk di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi;

- menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK);
- menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan untuk fasilitas pelayanan kesehatan primer;
- menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan kesehatan primer;
- melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

**(2). Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, mempunyai tugas :**

- menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- menyiapkan bahan rumusan kebijakan program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah

sakit serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;

- menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- menyiapkan bahan koordinasi program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu termasuk Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan untuk fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
- menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi Unit Transfusi Darah;
- melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

**(3). Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional, mempunyai tugas**

:

- menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan program pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- menyiapkan bahan koordinasi tentang program pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan program pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya;
- melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

- melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

#### **F. Bidang Sumber Daya Kesehatan**

Tugas : merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Manusia Kesehatan.

- Fungsi :
- pelaksanaan penyusunan program kerja bidang sumber daya kesehatan;
  - penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
  - penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
  - pelaksanaan koordinasi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
  - Pelaksanaan bimbingan teknik dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
  - pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
  - Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya

##### **(1). Seksi Kefarmasian, mempunyai tugas :**

- menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kefarmasian;
- menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetik, makanan dan pelayanan kefarmasian;
- menyiapkan bahan rumusan kebijakan tentang program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetik, makanan dan pelayanan kefarmasian;

- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan tentang program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetik, makanan dan pelayanan kefarmasian;
- menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetik, makanan dan pelayanan kefarmasian;
- menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetik, makanan dan pelayanan kefarmasian;
- menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetik, makanan dan pelayanan kefarmasian;
- menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetik, makanan dan pelayanan kefarmasian;
- menyiapkan bahan koordinasi tentang tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetik, makanan dan pelayanan kefarmasian;
- menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pengelolaan serta pelaporan obat buffer provinsi, obat program kesehatan, obat untuk penanggulangan KLB dan Bencana dan obat yang bersifat insidentil;
- menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT) dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang;
- melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

**(2). Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga, mempunyai tugas:**

- menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga;
- menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- menyiapkan bahan rumusan kebijakan tentang program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;

- menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- menyiapkan bahan koordinasi tentang tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan pengakuan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
- melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

**(3). Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, mempunyai tugas**

:

- menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan tentang program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;

- menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan dan pengendalian perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- menyiapkan bahan koordinasi tentang perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- menyiapkan bahan penyusunan peta sumber daya manusia kesehatan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- menyiapkan bahan fasilitasi kebijakan teknis dan standarisasi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan dan pengembangan jabatan fungsional;
- menyiapkan bahan koordinasi registrasi tenaga kesehatan;
- menyiapkan bahan penilaian angka kredit jabatan fungsional rumpun kesehatan;
- melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

#### **G. Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK)**

Tugas : Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Fungsi : - Penyelenggaraan pelayanan medik;  
 - Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;  
 - Penyelenggaraan asuhan keperawatan;

- Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- Penyelenggaraan usaha Pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksariaan fasilitas penyelenggaraari Pendidikari bagi calon dokter, dokter spesialis, dan tenaga Kesehatan lainnya;
- Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan fungsinya

Susunan Organisasi UOBK (RSUD Syamrabu) :

**(1) Direktur, bertugas :**

Memimpin, menetapkan kebijakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi serta mengeridalikan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit

**(2) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, bertugas:**

Melaksanakan tugas di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan kebidanan

**2.1 Bidang Pelayanan Medik**

**a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan**

**Pelayanan Medik, mempunyai tugas :**

- melakukan penyusunan dan rencana kegiatan seksi perencanaan dan pengembangan pelayanan medik
- melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pelayanan medik
- melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pelayananmedik
- melakukan kegiatan pelayanan medik
- melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang perencanaan dan pengembangan pelayanan medik
- melakukan pemantauan kegiatan pelayanan

medik

- melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelayanan medik
- melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan pelayanan medik
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik sesuai bidang tugasnya.

**b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Medik, mempunyai tugas :**

- melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Medik
- melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan medik
- melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan medik
- melakukan kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan medik
- melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan medik
- melakukan pemantauan kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan medik
- melakukan pengumpulan data dan informasi dalam penyelesaian permasalahan di bidang pelayanan medik
- melakukan analisa, evaluasi dari pelaporan atas kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan medik

- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik sesuai bidang tugasnya.

## **2.2 Bidang Pelayanan Keperawatan**

### **a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan, mempunyai tugas :**

- melakukan penyusunan dan rencana kegiatan seksi Perencanaan dan pengembangan Pelayanan Keperawatan dan kebidanan
- melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan, pengembangan serta Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan
- melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang Perencanaan, pengembangan serta Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan
- melakukan kegiatan di bidang Perencanaan, pengembangan serta Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan
- melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan
- melakukan pemantauan kegiatan di bidang Perencanaan, pengembangan serta Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan
- melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang Perencanaan, pengembangan serta Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan
- melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan di bidang Pelayanan Keperawatan dan kebidanan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan sesuai bidang tugasnya.

**b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan**

**Keperawatan, mempunyai tugas :**

- melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Keperawatan dan kebidanan
- melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengawasan pengendalian pelayanan keperawatan dan kebidanan
- melakukan penyiapan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian pelayanan keperawatan dan kebidanan
- melakukan kegiatan di bidang pengawasan, pengendalian pelayanan keperawatan dan kebidanan
- melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang pengawasan, pengendalian pelayanan keperawatan dan kebidanan
- melakukan pemantauan kegiatan di bidang pengawasan, pengendalian pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- melakukan pengumpulan data dan informasi dalam penyelesaian permasalahan di bidang pengawasan, pengendalian pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan di bidang pengawasan, pengendalian pelayanan keperawatan dan kebidanan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan sesuai bidang tugasnya

**(3) Wakil Direktur Penunjang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian, bertugas :**

Melaksanakan tugas di bidang penunjang pelayanan, pendidikan dan penelitian.

### **3.1 Bidang Penunjang Pelayanan**

#### **a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penunjang**

##### **Pelayanan, mempunyai tugas :**

- melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penunjang Pelayanan
- melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan dan Pengembangan Penunjang Pelayanan
- melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang Perencanaan dan Pengembangan Penunjang Pelayanan
- melakukan kegiatan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Penunjang Pelayanan
- melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Perencanaan dan Pengembangan Penunjang Pelayanan;
- melakukan pemantauan kegiatan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Penunjang Pelayanan
- melakukan pengumpulan data dan informasi dalam penyelesaian permasalahan di bidang Pelayanan Penunjang Pelayanan
- melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Penunjang Pelayanan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penunjang**

##### **Pelayanan, mempunyai tugas :**

- melakukan penyusunan dan rencana kegiatan seksi Pengawasan dan Pengendalian Penunjang Pelayanan
- melakukan penyiapan bahan penyusunan

pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian Penunjang Pelayanan

- melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengawasan dan pengendalian Penunjang Pelayanan
- melakukan kegiatan di bidang pengawasan Penunjang Pelayanan
- melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Penunjang Pelayanan
- melakukan pemantauan kegiatan di bidang Penunjang Pelayanan
- melakukan pengumpulan data dan informasi serta penyelesaian permasalahan di bidang Penunjang Pelayanan
- melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan dibidang Penunjang Pelayanan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Pelayanan sesuai bidang tugasnya.

### **3.2 Bidang Pendidikan dan Penelitian**

#### **a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai tugas**

:

- melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Seksi Pendidikan dan Pelatihan
- melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- melakukan inventarisasi jenis kebutuhan pendidikan dan penelitian
- melakukan kegiatan di bidang Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan

- Kesehatan Rujukan melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- melakukan pemantauan kegiatan di bidang Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  - melakukan pengumpulan data dan informasi dalam penyelesaian permasalahan di bidang Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  - melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan di bidang Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
  - melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan penelitian sesuai bidang tugasnya.

**b. Seksi Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas:**

- melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan
- melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- melakukan inventarisasi potensi pengembangan di bidang pelayanan kesehatan rujukan
- melakukan kegiatan di bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- melakukan pemantauan kegiatan di bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan

#### Kesehatan Rujukan

- melakukan pengumpulan data dan informasi serta penyelesaian permasalahan di bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- melakukan analisa, evaluasi dari pelaporan atas kegiatan di bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perididikan dan Penelitian sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **(4) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, bertugas :**

Melaksanakan tugas di bidang perencanaan, umum dan keuangan

##### **4.1 Bagian Perencanaan dan Evaluasi**

###### **a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran, mempunyai tugas :**

- melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan dan Anggaran
- melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan program, rencana bisnis dan anggaran
- melakukan inventarisasi potensi anggaran di bidang perencanaan dan anggaran
- melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang perencanaan dan anggaran
- melakukan pemantauan kegiatan di bidang perencanaan dan anggaran
- melakukan pengumpulan data dan informasi serta penyelesaian permasalahan di bidang perencanaan dan anggaran
- melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan subbagian perencanaan dari anggaran
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi

sesuai dengan bidang tugasnya

**b. Sub Bagian Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :**

- melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Sub Bagian Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan
- melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan
- melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam bidang Rekam Medik, evaluasi dan pelaporan
- melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Rekam Medik, evaluasi dan pelaporan
- melakukan pemantauan kegiatan di bidang Rekam Medik, evaluasi dan pelaporan
- melakukan pengumpulan data dan informasi serta penyelesaian permasalahan di bidang Rekam Medik, evaluasi dan pelaporan
- melakukan penyusunan bahan profil rumah sakit sebagai pelayanan Kesehatan rujukan
- melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan pelayanan kesehatan rujukan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengari bidang tugasnya.

**c Sub Bagian Hukum dan Pemasaran, mempunyai tugas:**

- melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Sub Bagian Hukum dan Pemasaran Rumah Sakit
- melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Hukum dan Pemasaran Rumah Sakit
- melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam bidang Hukum dan Pemasaran Rumah Sakit

- melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Hukum dan Pemasaran Rumah Sakit
- melakukan pelaksanaan kegiatan dalam bidang hukum dan pemasaran Rumah Sakit
- melakukan pemantauan kegiatan di bidang Hukum dan Pemasaran Rumah Sakit
- melakukan pengumpulan data dan informasi serta penyelesaian permasalahan di bidang Hukum dan Pemasaran Rumah Sakit
- melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan di bidang Hukum dan Pemasaran Rumah Sakit
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4.2 Bagian Umum**

##### **a. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, mempunyai tugas :**

- melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
- melakukan penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis di Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
- melakukan penyusunan bahan koordinasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
- melakukan penyelenggaraan surat menyurat, tata kearsipandan penggandaan
- melakukan penyelenggaraan tugas keprotokolan dan rumah tangga
- melakukan pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan
- melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
- melakukan penyiapan bahan fasilitasi

penyelesaian permasalahan di Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai bidang tugasnya.

**b. Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :**

- melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian
- melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Kepegawaian
- melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam bidang kepegawaian
- melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam bidang kepegawaian
- melakukan pelaksanaan kegiatan dalam bidang Kepegawaian
- melakukan pemantauan kegiatan di bidang Kepegawaian
- melakukan pengumpulan data dan informasi serta penyelesaian permasalahan di bidang kepegawaian
- melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan dibidang kepegawaian
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

**c. Sub Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas :**

- melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Sub Bagian Perlengkapan
- melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Perlengkapan
- melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam bidangPerlengkapan

- melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Perlengkapan
- melakukan pelaksanaan kegiatan administrasi dan inventarisasi di bidang perlengkapan
- melakukan pemantauan kegiatan di bidang perlengkapan
- melakukan pengumpulan data dan informasi serta penyelesaian permasalahan di bidang Perlengkapan
- melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan di bidang perlengkapan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya

### **4.3 Bagian Keuangan dan Akuntansi**

#### **a. Sub Bagian Penerimaan dan Pendapatan, mempunyai tugas :**

- melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Sub Bagian Penerimaan dan Pendapatan
- melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Penerimaan dan Pendapatan
- melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam bidang Penerimaan dan Pendapatan
- melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Penerimaan dan Pendapatan
- melakukan pelaksanaan kegiatan di bidang Penerimaan dan Pendapatan
- melakukan pemantauan kegiatan di bidang Penerimaan dan Pendapatan
- melakukan pengumpulan data dan informasi serta penyelesaian permasalahan di bidang Penerimaan dan Pendapatan
- melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan di bidang Penerimaan dan Pendapatan

- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Sub Bagian Verifikasi dan Pembendaharaan, mempunyai tugas :**

- melakukan penyusunan dari rencana kegiatan Sub Bagian Verifikasi dan Pembendaharaan
- melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Verifikasi dan Pembendaharaan
- melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam bidang Verifikasi dan Pembendaharaan
- melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Verifikasi dan Pembendaharaan
- melakukan pelaksanaan kegiatan di bidang Verifikasi dan Pembendaharaan
- melakukan pemantauan kegiatan di bidang Verifikasi dan Pembendaharaan
- melakukan pengumpulan data dan informasi serta penyelesaian masalah di bidang Verifikasi dan Pembendaharaan
- melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan di bidang Verifikasi dan Pembendaharaan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi sesuai dengan bidang tugasnya.

**c. Sub Bagian Akuntansi, mempunyai tugas :**

- melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Sub Bagian Akuntansi
- melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Akuntansi
- melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam

bidang Akuntansi

- melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Akuntansi
- melakukan pelaksanaan kegiatan di bidang Akuntansi
- melakukan pemantauan kegiatan di bidang Akuntansi
- melakukan pengumpulan data dan informasi serta penyelesaian permasalahan di bidang Akuntansi
- melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan dibidang Akuntansi
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **H. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Tugas : Melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya

- Fungsi :
- Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan unit pelaksana teknis dinas
  - Pengumpulan bahan pelaksanaan pengolahan data kesehatan
  - Pengurusan surat – menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, humas dan keprotokolan serta administrasi kepegawaian dan keuangan
  - Pengumpulan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana
  - Pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan kepada tenaga teknis dan tenaga non teknis di bidang kesehatan
  - Pengumpulan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang kesehatan
  - Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Susunan Organisasi UPT ( 22 Puskesmas )

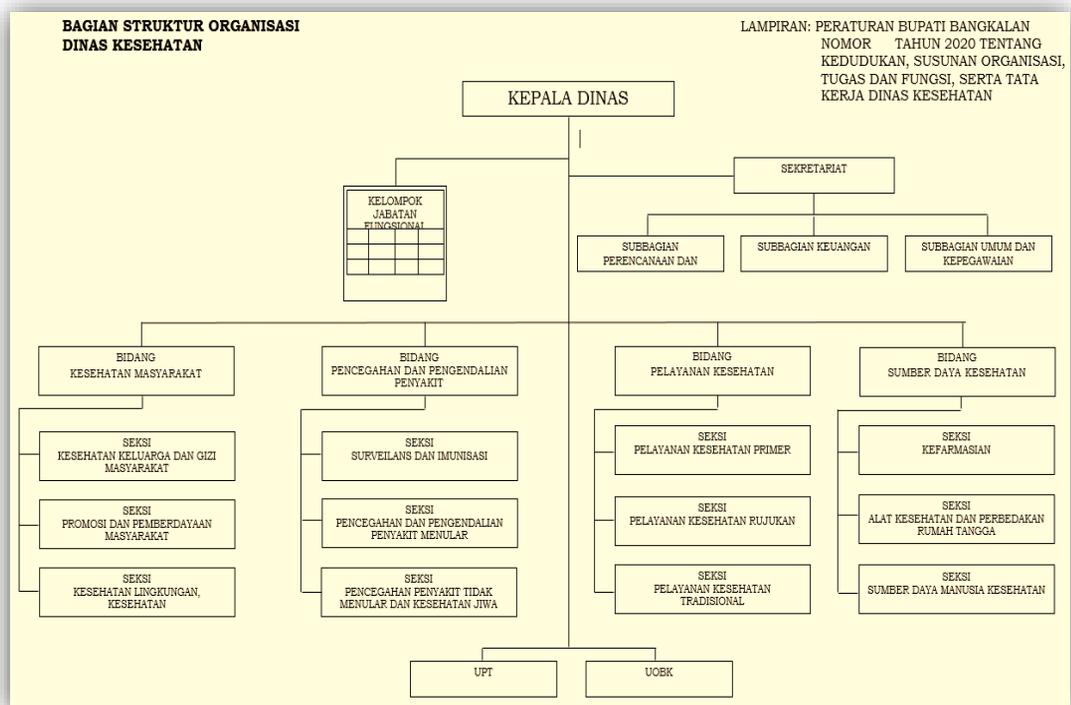
- a. **Kepala UPT Puskesmas**, mempunyai tugas :  
Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh penyelenggaraan kegiatan UPT Puskesmas
- b. **Sub Bagian Tata Usaha**, mempunyai tugas :  
Membantu Kepala UPT di bidang ketata usahaan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran puskesmas
- c. **Sub Bagian Jabatan Fungsional**, mempunyai tugas :  
Melaksanakan sebagian tugas UPT Puskesmas sesuai bidang keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan.

Memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan No.440 / 1034.1 / 433.106 / 2015 Tentang Struktur Organisasi Puskesmas paling sedikit terdiri atas :

1. Kepala Puskesmas;
2. Kepala tata usaha membawahi beberapa kegiatan diantaranya Koordinator tim Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan.
3. Penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang membawahi :
  - a. Pelayanan promosi kesehatan
  - b. Pelayanan kesehatan lingkungan
  - c. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM
  - d. Pelayanan gizi yang bersifat UKM
  - e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
  - f. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat
4. Penanggungjawab UKM Pengembangan, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
  - a. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat
  - b. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer
  - c. Pelayanan kesehatan olahraga
  - d. Pelayanan kerja
  - e. Pelayanan lainnya

5. Penanggungjawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium, membawahi beberapa kegiatan, yaitu:
  - a. Pelayanan pemeriksaan umum
  - b. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
  - c. Pelayanan keluarga yang bersifat UKP
  - d. Pelayanan gawat darurat
  - e. Pelayanan gizi yang bersifat UKP
  - f. Pelayanan persalinan
  - g. Pelayanan rawat inap
  - h. Pelayanan kefarmasian
  - i. Pelayanan laboratorium
6. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas, yang membawahi :
  - a. Puskesmas Pembantu
  - b. Puskesmas Keliling
  - c. Bidan Desa
  - d. Jejaring Puskesmas
7. Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan
8. Penanggung jawab mutu

### 3. Struktur Organisasi



**Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan**  
 Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan No. 84 Tahun 2020

## 2.2. SUMBER DAYA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN

Upaya pembangunan kesehatan dapat berdaya guna dan berhasil guna bila kebutuhan sumber daya kesehatan dapat terpenuhi. Dalam Sub bab ini, gambaran mengenai situasi sumber daya kesehatan dikelompokkan ke dalam sajian data dan informasi mengenai:

1. Tenaga kesehatan,
2. Sarana kesehatan, dan
3. Sumber dana/pembiayaan kesehatan.

### 2.2.1. Tenaga Kesehatan

Tenaga Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan berdasarkan struktur kepegawaian menurut Peraturan Pemerintah Daerah No. 41 Tahun 2007 dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam menyelesaikan program kesehatan dibantu oleh Sekretaris dan 4 kepala bidang 3 Kepala Sub Bagian dan 12 Kepala Seksi.

Sedangkan jumlah tenaga, jenis pendidikan, pangkat dan golongan tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan sampai dengan Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

#### JUMLAH TENAGA, JENIS PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021

##### A. Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas

No	Tenaga Kesehatan	Tahun 2021
<b>1</b>	<b>Status kepegawaian</b>	
	Pegawai negeri sipil (PNS)	926
	Pegawai P3K	74
	Pegawai Tidak Tetap (THL)	413
<b>2</b>	<b>Latar belakang pendidikan (PNS)</b>	
	Magister (S2)	22
	Sarjana (S1)	244
	Sarjana muda/Diploma IV(D4)	77
	Sarjana muda/Diploma III (D3)	473
	Sarjana muda/Diploma II (D2)	-
	Sarjana muda/Diploma I (D1)	2
	SLTA	106
	SLTP	2
	SD	-
<b>3</b>	<b>Pangkat dan golongan (PNS)</b>	

No	Tenaga Kesehatan	Tahun 2021
	Golongan IV	124
	Golongan III	520
	Golongan II	281
	Golongan I	1
<b>4</b>	<b>Pejabat struktural dan fungsional (PNS)</b>	
	Struktural (Eselon II, III dan IV)	7
	Fungsional Umum	81
	Fungsional Teknis	13

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Bangkalan

#### B. RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu (UOBK)

No	Jenis Ketenagaan	Jumlah	Minimal Type B
1.	Tenaga Medis : Dokter Umum Dokter Gigi Dokter Gigi Spesialis Dokter Ahli / Spesialis Dokter Sub spesialis Apoteker	22 2 4 42 2 16	Syarat RS type B pendidikan sekurangnya; a. 12 spesialis dasar b. 8 spesialis penunjang medik c. 2 sub spesialis lainnya syarat sudah terpenuhi
2.	Paramedis / Perawat / Bidan PNS THL/kontrak	200 166	Jumlah tenaga paramedis tergantung dari kompetensi perorangan dan terus di lakukan update keilmuan
3.	Tenaga Nakes Lain PNS THL/Kontrak	35 51	Jumlah tenaga nakes lain tergantung dari kompetensi perorangan dan terus di lakukan update keilmuan
4.	Non Medis PNS THL/Kontrak	102 364	
	TOTAL	1.006	

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian RSUD Syamrabu Bangkalan

### KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN SE KABUPATEN BANGKALAN

#### TAHUN 2021

NO	JENIS TENAGA	TAHUN 2021
1.	Dokter Spesialis	56
2.	Dokter umum	122

NO	JENIS TENAGA	TAHUN 2021
3.	Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis	31
4.	Sarjana Kesehatan Masyarakat	9
5.	Tenaga Kefarmasian	95
6.	Bidan	1134
7.	Perawat	1199
8.	Tenaga Gizi	41
9.	Tenaga Kesehatan Lingkungan	26
10.	Tenaga Teknis Medis	35
11.	Fioterapis	5
12.	Tenaga Psikologi	1
13.	Tenaga Laboratorium	55
14.	Teknis Bio Medis	30
15.	Apoteker	29

Sumber : Profil Kesehatan 2021

### 2.2.2. Sarana Kesehatan

Sedangkan jumlah sarana Kesehatan kondisi s/d tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

#### JUMLAH SARANA KESEHATAN KAB BANGKALAN TAHUN 2021

NO	SARANA KESEHATAN	TAHUN 2021
<b>1.</b>	<b>Fasilitas Sarana Kesehatan</b>	
	1. Rumah Sakit Umum Pemerintah	1
	2. Rumah Sakit Umum Swasta	6
	3. Puskesmas	22
	4. Puskesmas Perawatan	22
	5. Puskesmas Pembantu	67
	6. Puskesmas Keliling	41
	7. Puskesmas Plus	0
	8. Puskesmas PONED	7
	9. Polindes/Poskesdes (Aset Milik Pemerintah)	30
	10. Polindes (Sewa/Kontrak)	251
<b>2.</b>	<b>Fasilitas UKBM</b>	
	A. Posyandu	1136
	B. Poskesdes	281
	C. Desa Siaga Aktif	
	a. Pratama	148
	b. Madya	104
	c. Purnama	14
	d.	6

Sumber: Data Mandiri Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan tahun 2021

### **2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN**

Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan selalu berpedoman pada program-program yang berorientasi terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat yang bentuk kegiatannya bertujuan untuk kepentingan mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan dengan pemberian pelayanan prima yang didukung oleh ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya yang produktif dan proporsional.

#### **2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan**

Pencapaian kinerja pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan dapat diukur dari beberapa indikator. Dan pencapaian indikator nya terdapat pada Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

#### **2.3.2 Sumber Dana Kesehatan**

Pembiayaan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, sebagian besar bersumber dari Anggaran APBD Kabupaten Bangkalan.

Jika dilihat sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 anggaran Dinas Kesehatan bergerak dinamis. Ada penurunan anggaran dari tahun 2019 ke tahun 2020, namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan. Pada tahun anggaran 2022 kembali mengalami penurunan. Anggaran dan realisasi Dinas Kesehatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Bangkalan**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio/Capaian Pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Angka Harapan Hidup (AHH)			IKU	69.83	69.96	70.15	71.56	71.89	70.11	70.18	72,75	73,05	73,29	100.4	100.3	100.3	100.2	100.1
2	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	SPM			16.966	16.878	16.878	16.897	16.299	14.698	15.900	16.878	16.897	15.726	86,63	94,21	100,00	100,00	96.48
3	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	SPM			16.195	16.878	16.799	1.543	15.558	15.586	13.696	16.799	1.543	14.805	96,24	81,15	100,00	100,00	95.16

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio/Capaian Pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar				15.424	14.889	14.819	15.361	14.910	15.471	14.783	14.819	15.361	14.910	100,30	99,29	100,00	100,00	100
5	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	SPM			76.744	76.236	75.770	61.676	61.702	78.736	57.421	75.770	61.676	53.240	102,60	75,32	100,00	100,00	86.29
6	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan	SPM			37.288	37.289	37.755	158.905	53.014	49.166	136.519	37.755	158.905	44.291	131,85	366,11	100,00	100,00	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio/Capaian Pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar																		
7	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	SPM			647.950			613.352	614.653	265.301	337.618		613.352	608.963	40,94			100,00	99
8	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan	SPM			122.389			116.529	95.194	102.030	94.236		116.529	93.246	83,37			100,00	97.95

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio/Capaian Pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun																		
9	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	SPM			210.270	231.290	254.400	287.889	290.648	99.224	135.198	254.040	287.889	288.235	47,19	58,45	99,86	100,00	99.17
10	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun	SPM			12.312	13.081	13.594	14.184	13.364	13.021	13.106	13.594	14.184	13.295	105,76	100,19	100,00	100,00	99.48

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio/Capaian Pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	waktu satu tahun																		
11	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	SPM			1.342	1.409	1.479	1.674	1.690	1.518	1.560	1.479	1.674	1.690	113,11	110,72	100,00	100,00	100
12	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	SPM			13.500	14.000	14.500	10.246	11.517	3.268	8.213	14.500	10.246	11.517	24,21	58,66	100,00	100,00	100
13	Jumlah orang berisiko	SPM			9175	10120	11000	18756	14.926	12147	14538	11000	18756	14.863	132,39	143,66	100,00	100,00	99.58

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio/Capaian Pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun																		
14	Bed Occupancy Rate (BOR) Rumah Sakit (RSUD dan RS Swasta)		IKK		100%	100%	100%	100%	100%	52,80 %	35,70 %	37,80 %	44,10 %	61,43 %	52,80	35,70	37,80	44,10	61,43
15	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi		IKK		100%	100%	100%	100%	100%	42,86 %	42,86 %	42,86 %	42,86 %	71,42 %	42,86	42,86	42,86	42,86	71,42
16	Persentase ibu hamil mendapatkan		IKK		100%	100%	100%	100%	100%	82,34 %	89,86 %	90,02 %	94,10 %	100%	82,34	89,86	90,02	94,10	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio/Capaian Pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	pelayanan kesehatan ibu hamil																		
17	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		IKK		100%	100%	100%	100%	100%	81,46%	84,77%	92,45%	88,76%	100%	81,46	84,77	92,45	88,76	100
18	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		IKK		100%	100%	100%	100%	100%	97,24%	85,03%	97,03%	96,24%	100%	97,24	85,03	97,03	96,24	100
19	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		IKK		100%	100%	100%	100%	100%	78,11%	59,89%	68,41%	93,10%	100%	78,11	59,89	68,41	93,10	100
20	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan		IKK		100%	100%	100%	100%	100%	103,62%	53,21%	30,85%	85,91%	97,92%	103,62	53,21	30,85	85,91	97.92

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio/Capaian Pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	pelayanan kesehatan sesuai standar																		
21	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		IKK		100%	100%	100%	100%	100%	28,49 %	30,17 %	43,38 %	55,04 %	99,07 %	28,49	30,17	43,38	55,04	99,07
22	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		IKK		100%	100%	100%	100%	100%	93,99 %	93,68 %	72,15 %	80,87 %	97,99 %	93,99	93,68	72,15	80,87	97,99
23	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan		IKK		100%	100%	100%	100%	100%	28,44 %	30,98 %	34,82 %	46,96 %	99,16 %	28,44	30,98	34,82	46,96	96,16

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio/Capaian Pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	kesehatan sesuai standar																		
24	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		IKK		100%	100%	100%	100%	100%	83,76 %	90,90 %	92,76 %	92,40 %	99,48 %	83,76	90,90	92,76	92,40	99,48
25	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		IKK		100%	100%	100%	100%	100%	87,40 %	73,31 %	91,72 %	93,19 %	100%	87,40	73,31	91,72	93,19	100
26	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		IKK		100%	100%	100%	100%	100%	70,06 %	100,00 %	32,85 %	80,16 %	100%	70,06	100,00	32,85	80,16	100
27	Persentase orang dengan		IKK		100%	100%	100%	100%	100%	78,14 %	80,22 %	70,12 %	81,72 %	99,57 %	78,14	80,22	70,12	81,72	99,57

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio/Capaian Pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar																		
	<b>RSUD SYAMRABU</b>																		
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				72%	75%	80%	80%	80%	70,52%	70,59%	82,45%	82,74%	87,79%	97,94	94,12	103,06	103,43	109,74
2	Cost Recovery Rate (CRR)				105%	105%	106%	106%	106%	99,77%	107,27%	150,76%	91,93%	117,93%	95,02	102,16	142,23	86,73	111,25
3	SAKIP RSUD									65,22	63,6	65,89	62,8	63,1					

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Bangkalan**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio/Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023 (Pagu RKA)	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA	266,986,438,418.81	234,588,758,714.28	247,716,002,551.00	246,373,166,619.00	232,428,410,918.00	222,620,757,052.90	217,415,901,762.56	209,427,518,196.00	277,193,832,177.5	-	83.38%	92.68%	84.54%	112,5%	-	248,916,091,575.77	216,488,059,003.82
BELANJA TIDAK LANGSUNG	57,234,208,272.00	60,223,321,862.00	184,309,418,981	92,743,762,910.00	94,049,387,831.00	56,355,553,243.00	56,894,177,297.56	146,154,692,260.00	88,561,843,915.59	-	98.46%	94.47%	79,29%	95,49%	-	70,704,143,262.50	86,468,140,933.52
Belanja Pegawai	57,234,208,272.00	60,223,321,862.00	72,615,280,006.00	92,743,762,910.00	94,049,387,831.00	56,355,553,243.00	56,894,177,297.56	146,154,692,260.00	88,561,843,915	-	98.46%	94.47%	79,29%	95,49%	-	70,704,143,262.50	86,468,140,933.52
BELANJA LANGSUNG	209,752,230,146.81	174,365,436,852.28	63,508,902,541	246,405,926,019	138,379,023,087.00	166,265,203,809.99	160,521,724,465.00	63,272,825,936.00	188,631,988,262	-	79.27%	92.06%	99,63%	76,55%	-	178,211,948,313.27	130,019,918,070.33
Program Pelayanan Kesekretariatan	45,187,164,203.00	38,196,361,686.00	-	-	-	41,984,221,199.59	36,350,680,854.00	-	-	-	92.91%	95.17%	-	-	-	41,691,762,944.50	39,167,451,026.80
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	4,387,419,236.00	5,840,000,000.00	-	-	-	4,299,806,979.49	5,479,236,909.00	-	-	-	98.00%	93.82%	-	-	-	5,113,709,618.00	4,889,521,944.25
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	111,252,206,264.91	94,955,130,552.16	-	-	-	91,260,755,125.41	81,491,636,495.00	-	-	-	82.03%	85.82%	-	-	-	103,103,668,408.54	86,376,195,810.21

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio/Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023 (Pagu RKA)	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	3,599,972,200.00	3,556,201,390.00	-	-	-	1,885,146,157.00	1,844,151,961.00	-	-	-	52.37%	51.86%	-	-	-	3,578,086,795.00	1,864,649,059.00
Program pelayanan kesehatan Masyarakat	-	1,500,000,000.00	-	-	-	0.00	1,224,494,234.00	-	-	-		81.63%	-	-	-	750,000,000.00	612,247,117.00
Program peningkatan, pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1,017,107,540.00	2,915,247,705.00	-	-	-	969,501,098.00	2,862,240,186.00	-	-	-	95.32%	98.18%	-	-	-	1,966,177,622.50	1,915,870,642.00
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	44,308,360,702.90	27,402,495,519.12	-	-	-	25,865,773,250.50	28,558,828,897.00	-	-	-	58.38%	104.22%	-	-	-	35,855,428,111.01	27,212,301,073.75
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	78,795,556,551.00	137,337,276,337	136,183,647,380.00	-	-	77,554,660,417.00	124,646,678,119	-	-	-	98.43%	-	-	97,735,138,559.00	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	155,154,715,112.00	108,492,340,682	94,647,970,385.00	-	-	119,849,069,887.00	63,473,443,315	-	-	-	77.24%	-	-	111,758,675,535.67	

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio/Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023 (Pagu RKA)	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	13,001,505,766.00	30,000,000.00	392,591,000.00	-	-	11,425,834,690.00	30,000,000.00	-	-	-	87.88%	-	-	4,474,698,922.00	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	-	-	203,156,200.00	217,706,000.00	714,628,500.00	-	-	192,644,400.00	206,952,200	-	-	-	94.83%	-	-	378,496,900.00	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	-	-	561,068,922.00	328,603,000.00	430,870,000.00	-	-	405,238,800.00	274,910,628	-	-	-	72.23%	-	-	440,180,640.67	

### **2.3.3. Pelayanan Kesehatan Masyarakat**

#### **2.3.3.1. Pelayanan Kesehatan Dasar**

Pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara cepat dan tepat, diharapkan sebagian besar masalah kesehatan dapat diatasi.

Berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

##### **A. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin**

Pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi antara lain pelayanan antenatal, persalinan, nifas dan perawatan bayi baru lahir yang diberikan di sarana kesehatan mulai Posyandu, Polindes sampai dengan Puskesmas.

1) **Pelayanan Antenatal (K1 dan K4)** merupakan pelayanan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan profesional (Dokter spesialis kandungan kebidanan, Dokter Umum, dan Bidan) yang diberikan pada ibu hamil selama masa kehamilannya. Pada tahun 2020 gambaran persentase pada cakupan pelayanan K1 yaitu sebesar 15.464 orang (90,3%) dan K4 sebesar 13.293 orang (77,6%) dari seluruh ibu hamil sebanyak 17.122 orang

2) **Pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi Kebidanan**, dari hasil pengumpulan data diketahui bahwa angka kelahiran yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (professional) lebih tinggi jika dibandingkan dengan persalinan yang ditolong oleh non tenaga kesehatan (Dukun Bayi).

Pada tahun 2020 cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 14.729 orang (90,1%) yang menggambarkan bahwa realisasi tersebut sudah mencapai target nasional, dimana masyarakat pada saat ini sudah banyak yang melakukan persalinan di rumah bidan, rumah sakit atau rumah bersalin daripada melakukan persalinan oleh dukun.

- 3) **Penanganan Komplikasi Kebidanan**, yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Komplikasi dalam kehamilan antara lain: Abortus, Hiperemesis Gravidarum, pendarahan per vaginam, hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia, eklampsia), kehamilan lewat waktu dan ketuban pecah dini.

Pada tahun 2020 di Kabupaten Bangkalan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai 65,24% atau 2.234 orang dari perkiraan ibu hamil dengan resiko tinggi/komplikasi yaitu sebanyak 3.424 orang.

- 4) **Pelayanan Ibu Nifas** yaitu pelayanan ibu nifas yang bisa dilakukan di Polindes, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Posyandu, unit Pelayanan Swasta dan rumah yang dilakukan oleh petugas kesehatan dengan pelayanan kesehatan yang standart minimal 3 kali dengan distribusi pelayanan 6 jam pasca persalinan sampai dengan 7 hari 1 kali, 29 sampai 42 hari 1 kali dan pemberian vitamin.

Pada tahun 2020 jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan sebesar 14.825 orang atau 90,7% dari jumlah ibu bersalin/nifas.

## **B. Pelayanan Kesehatan Bayi**

- 1) **Kunjungan Neonatus (KN1 dan KN Lengkap)**, merupakan pelayanan kesehatan pada bayi (neonatus) yang masih berumur kurang dari satu bulan (0 – 28 hari), dengan melakukan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, pemeriksaan kesehatan bayi dan konseling perawatan bayi kepada ibu.

Pada tahun 2020 cakupan kunjungan neonatus 1 kali (KN1) sebesar 14.811 bayi (98,4%)

- 2) **Pelayanan Kesehatan Bayi** yaitu bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standart oleh petugas kesehatan minimal 4 kali setelah mendapatkan pelayanan neonatal (KN), dengan distribusi pelayanan minimal umur 1 – 3 bulan 1 kali, umur 4 – 6 bulan 1 kali, umur 7 – 9 bulan 1 kali, umur 10 – 11 bulan 1 kali dalam bentuk pelayanan:

pemberian imunisasi lengkap, pemberian vitamin, dan MTBM (Manajemen Terpadu Balita Muda).

Pada tahun 2020 pelayanan kesehatan pada bayi sebanyak 10.375 atau 70,4%

### **C. Pelayanan Kesehatan Anak Balita**

Anak balita adalah anak dengan usia 12-59 bulan. Pelayanan kesehatan terhadap anak balita juga perlu dilakukan sesuai standart, yaitu minimal 8 kali dalam setahun. Bentuk pelayanannya antara lain : pemberian Vitamin A dosis tinggi 2 kali pertahun serta dilakukan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

Pada tahun 2020, anak balita yang mendapat pelayanan kesehatan minimal 8 kali mencapai 41.097 anak balita atau sebesar 52,9% dari jumlah anak balita sebesar 77.634 anak balita

### **D. Pelayanan Keluarga Berencana**

Pelayanan kesehatan yang diberikann untuk Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif. Menurut hasil penelitian, usia subur seorang wanita biasanya antara 15 – 49 tahun. Oleh karena itu untuk mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran, wanita atau pasangan ini lebih diprioritaskan untuk menggunakan alat/cara KB.

Gambaran pelayanan KB pada tahun 2020 yaitu peserta KB baru sebesar 19.302 orang dari 165.051 pasangan usia subur (PUS). Sedangkan peserta KB aktif 113.770 orang (68,9%) dari 165.051 pasangan usia subur.

### **E. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Anak SD dan Setingkat**

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut meliputi pelayanan dasar gigi dan usaha kesehatan gigi sekolah (UKGS). Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 237 sekolah (29,7%) yang mengikuti program sikat gigi missal dari jumlah SD/MI yaitu 799 sekolah. Sementara itu, dari jumlah total murid yang diperiksa yaitu 113.921 orang sebanyak 4.779 orang atau 45% murid yang mendapatkan perawatan.

## **F. Pelayanan Imunisasi**

Pelayanan kesehatan bagi anak-anak dibawah usia 1 tahun dengan melakukan pemberian vaksin dalam suatu rangkaian jadwal yang terukur pada bayi 0 bulan hingga 1 tahun, dengan mendapatkan imunisasi lengkap seperti : 1 dosis BCG, 4 dosis Hepatitis B, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio dan 1 dosis campak.

## **G. Perbaikan Gizi Masyarakat**

Program perbaikan gizi masyarakat adalah salah satu program pokok puskesmas yaitu program kegiatan yang meliputi : penanggulangan KEP, GAKY, kurang vitamin A, peningkatan surveillence gizi dan pemberdayaan usaha perbaikan gizi keluarga. Kegiatan program perbaikan gizi masyarakat dapat dilakukan dalam gedung maupun di luar gedung puskesmas. Upaya yang dilakukan untuk perbaikan gizi masyarakat antara lain:

- 1) **Peningkatan pemberian ASI eksklusif** adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman lain pada bayi usia 0 – 6 bulan
- 2) **Pemberian MP-ASI** anak umur 6 – 24 bulan adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin selama 90 HMA
- 3) **Pemberian tablet besi (90 tablet) pada Ibu hamil** adalah pemberian tablet besi (90 tablet) selama masa kehamilan yang bertujuan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kasus anemia serta meningkatkan daya tahan tubuh, karena kekurangan Fe pada ibu hamil dapat mengakibatkan terjadinya abortus, kecacatan bayi atau bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR).
- 4) **Pemberian kapsul vitamin A**, cakupan pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi dibagi 3 sasaran yaitu:
  - a) Bayi umur 6 – 11 bulan kapsul biru (100 - 0001 u)
  - b) Anak usia 1 – 5 tahun kapsul merah (200 – 0001 u)
  - c) Ibu nifas 2 kapsul warna merah (200 – 0001 u)
- 5) **Pemberian PMT pemulihan pada balita kurang gizi** dari keluarga miskin yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan tata laksana gizi

- 6) **Kegiatan pelacakan gizi buruk dan pos gizi** yang dilakukan setiap saat jika ditemukan masalah gizi
- 7) **Pemantauan pertumbuhan berat badan balita** melalui penimbangan balita dan pengukuran tinggi badan untuk mengetahui pola pertumbuhan dan perkembangan berat badan setiap bulan
- 8) **Kegiatan konseling gizi, KP ASI**, dalam rangka peningkatan pendidikan gizi dan pemberdayaan Kadarzi
- 9) **Penanggulangan GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium)**, GAKY menjadi salah satu permasalahan gizi yang ada di Indonesia. Upaya-upaya dalam penanggulangan GAKY yang dilakukan di Kabupaten Bangkalan melalui konsumsi garam beryodium. Sebaran dan besarnya masalah garam yang beredar di berbagai kecamatan sangat penting untuk diketahui, oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan garam beryodium secara terintegrasi.

#### **2.3.3.2. Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Penunjang**

Upaya pelayanan kesehatan rujukan dan penyediaan fasilitas penunjang merupakan bagian upaya dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

##### **a. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit**

Upaya pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan pelayanan rawat inap baik secara langsung maupun melalui rujukan pasien bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan sedang hingga berat.

Untuk melaksanakan salah satu prioritas visi dan misi Kepala Daerah, pelayanan kesehatan rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ke Rumah Sakit juga menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa indikator yaitu kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan pemenuhan sarana prasarana dan sumber daya manusia Rumah Sakit, serta perbaikan sistim rujukan untuk meningkatkan dan mempermudah akses bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Data indikator pelayanan Rumah Sakit di Kabupaten Bangkalan yang ada bawah ini, dicapai hasil sebagai berikut:

NO	NAMA RUMAH SAKIT <sup>a</sup>	JUMLAH TEMPAT TIDUR	PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI)	JUMLAH HARI PERAWATAN	JUMLAH LAMA DIRAWAT	BOR (%)	BTO (KALI)	TOI (HARI)	ALOS (HARI)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU	331	18395	5654	56497	55.3	65.7	2.48	3,07
2	RS dr. LUKAS	50	2405	7862	5487	46.8	52.28	3.71	3.28
3	RS ANNA MEDIKA MADURA	68	1014	4841	37	32.3	24.73	9.98	3.65
4	RS AISYIAH	12							
5	RSB HIKMAH SAWI	20							
6	RS ISHAQY	26							
7	RSB GLAMOUR	18							
<b>KABUPATEN/KOTA</b>		<b>528</b>	<b>21818</b>	<b>18357</b>	<b>62021</b>	<b>134.4</b>	<b>142.7</b>	<b>16.17</b>	<b>6.93</b>

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

#### b. Pelayanan Kesehatan Penunjang

Pemeriksaan Laboratorium dan Radiodiagnostik merupakan pelayanan kesehatan penunjang dalam menegakkan suatu diagnose penyakit.

#### c. Pelayanan Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

Pada tahun 2021 Pemerintah Pusat mengalokasikan dana untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengeluarkan kebijakan anggaran untuk membiayai masyarakat miskin yang tidak ter-cover oleh JKN. Kebijakan “Biakes Maskin” adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk pembiayaan kesehatan masyarakat miskin yang tidak terlayani melalui program JKN. Adapun penyediaan dana untuk program JKN pada tahun 2019 – 2021 pada kisaran Rp. 28 Miliar, sedangkan Biakes Maskin tahun 2019



NO	INDIKATOR	SPM / STANDART NASIONAL	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	15,424	15,424	14,889	14,819	15,361	15,471	14,783	14,819	15,361	
	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>										
4	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	76,744	76,744	76,236	75,770	61,676	78,736	57,421	75,770	61,676	
	<b>Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</b>										
5	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	37,288	37,288	37,289	37,755	158,905	49,166	136,519	37,755	158,905	
	<b>Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</b>										
6	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan	647,950	647,950			613,352	265,301	337,618		613,352	

NO	INDIKATOR	SPM / STANDART NASIONAL	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun										
	<b>Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</b>										
7	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	122,389	122,389			116,529	102,030	94,236		116,529	
	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>										
8	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	21,027	21,027	23,129	25,440	287,889	99,224	135,198	25,440	287,889	
	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)</b>										
9	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan	12,312	12,312	13,081	13,594	14,184	13,021	13,106	13,594	14,184	



NO	INDIKATOR	SPM / STANDART NASIONAL	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Risiko Terinfeksi HIV</b>										
	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	9,175	9,175	10,120	11,000	18,756	12,147	14,538	11,000	18,756	

Sumber : Data Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

#### 2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Maka Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai perumusan dan pelaksana kebijakan di bidang kesehatan.

Adapun kelompok sasaran layanan bidang kesehatan adalah perorangan dan masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam arah kebijakan pada Renstra Dinas Kesehatan melalui program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

Dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan, Dinas Kesehatan memiliki Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah “Syamrabu” Bangkalan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 22 Puskesmas yang tersebar di 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan.

RSUD Syamrabu Bangkalan berfungsi memberikan layanan kesehatan perorangan sebagai fasilitas kesehatan tingkat kedua (rujukan) dan 22 Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat

pertama, yang memberikan layanan kesehatan kepada perorangan dan masyarakat.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syamrabu berada di Jalan Pemuda Kaffa di pusat Kota Bangkalan, dan 22 Puskesmas berada tersebar di 18 Kecamatan, antara lain:

1. Puskesmas Arosbaya
2. Puskesmas Bangkalan
3. Puskesmas Burneh
4. Puskesmas Banjar
5. Puskesmas Blega
6. Puskesmas Galis
7. Puskesmas Geger
8. Puskesmas Jaddih
9. Puskesmas Kamal
10. Puskesmas Klampis
11. Puskesmas Konang
12. Puskesmas Kokop
13. Puskesmas Kwanyar
14. Puskesmas Kedungdung
15. Puskesmas Modung
16. Puskesmas Sepulu
17. Puskesmas Socah
18. Puskesmas Sukolilo
19. Puskesmas Tanah Merah
20. Puskesmas Tongguh
21. Puskesmas Tragah
22. Puskesmas Tanjung Bumi

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN**

---

Kesehatan mempunyai peranan penting dalam upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis, demikian juga upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

Guna meningkatkan pelayanan kesehatan yang memadai keberadaan dan ketersediaan tenaga kesehatan yang profesional, termasuk pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan sangatlah penting baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga berbagai fasilitas kesehatan dan tenaga medis maupun paramedis yang memadai menjadikan barometer untuk menilai keberhasilan pembangunan kesehatan selama ini.

Perencanaan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui proses pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengawasan (P-4), sistim yang dipakai dalam perencanaan kesehatan berdasarkan prioritas program serta kebutuhan kesehatan yang berorientasi terhadap kepentingan masyarakat, yang ditopang dengan kemampuan daerah merupakan kunci keberhasilan pembangunan kesehatan.

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN**

Berdasarkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan sesuai tugas dan fungsinya yang diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Maka dapat **diidentifikasi permasalahan** sebagai berikut :

1. Kualitas pelayanan kesehatan belum memenuhi standar
2. Kompetensi, jumlah dan distribusi tenaga kesehatan belum terpenuhi
3. Masih adanya masalah gizi, masalah kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan masyarakat
4. Masih tingginya prevalensi penyakit menular dan tidak menular
5. Rendahnya masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat

6. Masih rendahnya pencapaian target beberapa indikator SPM terutama pada masalah balita
7. Belum optimalnya tata kelola organisasi

Untuk menyikapi permasalahan tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan akan menentukan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan strategi meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta derajat kesehatan dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan

Dengan rencana strategi meningkatkan pelayanan kesehatan, upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif dan peran serta masyarakat melalui arah kebijakan memperluas akses kesehatan untuk semua kalangan masyarakat dengan biaya terjangkau (gratis) dan peningkatan mutu sarana dan prasarana kesehatan

### **3.2. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Dalam melaksanakan tugas pembangunan urusan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan disamping mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan juga memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Kajian dokumen perencanaan sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Kesehatan
  1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
  2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular
  3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender
  4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi resiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin
  5. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50% menjadi 70%
  6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan
  7. Seluruh propinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular

8. Seluruh kabupaten / kota melaksanakan standard pelayanan minimal (SPM)
- b. Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
  1. Meningkatkan kualitas air bersih, sanitasi dasar, higiene sanitasi makanan minuman serta kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian faktor resiko dampak pencemaran lingkungan di masyarakat
  2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat ke arah kemandirian
  3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan lanjut usia serta kesehatan reproduksi
  4. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di rumah sakit, rumah sakit khusus dan balai kesehatan
  5. Meningkatkan keluarga sadar gizi dan perbaikan gizi masyarakat
  6. Meningkatkan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan makanan
  7. Mengembangkan kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistema informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan
  8. Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistema kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB / wabah, ancaman epidemi serta bencana
  9. Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standart

Dalam perkembangan lebih lanjut, Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2018 – 2023 mengamanahkan :

- I. Sasaran strategis Kementerian Kesehatan adalah :
  1. Meningkatnya kesehatan masyarakat dengan sasaran yang akan dicapai:
    - a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan

- b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik
  - c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan hidup bersih dan sehat
2. Meningkatnya pengendalian penyakit dengan sasaran yang akan dicapai :
- a. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
  - b. Penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu
  - c. Kabupaten / kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
  - d. Menurunnya prevalensi merokok pada usia  $\leq 18$  tahun
3. Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dengan sasaran yang akan dicapai:
- a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terakreditasi
  - b. Jumlah kabupaten / kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan sasaran yang akan dicapai :
- a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas
  - b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yang di produksi di dalam negeri
  - c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat
5. Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan dengan sasaran yang akan dicapai :
- a. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
  - b. Jumlah rumah sakit kabupaten / kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang
  - c. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian / lembag, dengan sasaran yang akan dicapai :
- a. Meningkatnya jumlah Kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan

- b. Meningkatnya persentase kabupaten / kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri, dengan sasaran yang akan dicapai :
    - a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan
    - b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung program kesehatan
    - c. Jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri di bidang kesehatan yang diimplementasikan
  8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi dengan sasaran yang akan dicapai :
    - a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana 5 tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber
    - b. Jumlah rekomendasi monitoring terpadu
  9. Meningkatnya efektifitas penelitian dan pengembangan kesehatan dengan sasaran yang akan dicapai :
    - a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI
    - b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelolah program kesehatan dan atau pemangku kepentingan
    - c. Jumlah laporan riset kesehatan nasional bidang kesehatan dan gizi masyarakat
  10. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan sasaran yang akan dicapai :
    - a. Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian negara  $\leq 1\%$
  11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan dengan sasaran yang akan dicapai :
    - a. Meningkatnya persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
    - b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik
  12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan sasaran yang akan dicapai :

- a. Meningkatnya persentase kabupaten / kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%
  - b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk akses pelayanan *e-health* sebesar 50%
- II. Sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah :
1. Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat
  2. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat
  3. Meningkatnya penanggulangan masalah gizi yang optimal
  4. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana
  5. Meningkatnya akses pada lingkungan yang sehat
  6. Meningkatnya sediaan farmasi, alkes, dan makanan gizi bermutu, bermanfaat dan aman
  7. Terwujudnya sumber daya kesehatan yang memadai, proporsional dan handal
  8. Meningkatnya pembiayaan kesehatan
  9. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi

### **3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan, maka perlu diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong terlaksananya tugas pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan yang dilakukan melalui analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Hal ini berkaitan dengan jumlah, letak dan kondisi sarana kesehatan yang diantaranya puskesmas, puskesmas pembantu, polindes dan poskesdes/Ponkesdes.

Ditinjau dari sisi potensi pengembangan wilayah, Kabupaten Bangkalan sebagai Kabupaten di Jawa Timur yang termasuk dalam kawasan Gerbang Kertausila sebagai salah satu pusat kegiatan Nasional. Dalam kaitan dengan kondisi tersebut, Kabupaten Bangkalan memiliki **Kawasan Strategis** yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan yaitu :

1. Kawasan pendorong pertumbuhan ekonomi baru antara lain :

a. Kawasan kaki Jembatan Suramadu

Merupakan kawasan strategis yang berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan sekitar dan dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang. Kawasan ini ditentukan berdasarkan potensi yang ada, serta memiliki kolerasi terhadap pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi, dengan pertimbangan dapat memberikan dampak perkembangan pada suatu wilayah. Kawasan ini meliputi sepanjang jalan tol dan akses jalan tol Suramadu dan sekitarnya seluas ± 600 ha. Secara umum, peruntukannya dititik beratkan pada keberadaan industri ringan dan hijau yang didukung dengan kawasan perdagangan, wisata dan permukiman.

b. Kawasan Industri dan Pelabuhan Socah

Pengembangan pelabuhan Socah yang terintegrasi dengan kawasan industri pendukungnya merupakan perencanaan jangka menengah dalam pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan industri di Madura

c. Kawasan pelabuhan peti kemas Tanjung Bulu Pandan

Kawasan pelabuhan peti kemas Tanjung Bulu Pandan di Kecamatan Klampis dan Arosbaya adalah kawasan yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan kaki Jembatan Suramadu. Kawasan ini direncanakan memiliki akses langsung dengan kawasan kaki Jembatan Suramadu melalui pengembangan jalan akses pelabuhan Tanjung Bulu Pandan melalui interchange Burneh.

Perkembangan 3 kawasan strategis dimaksud didukung dengan pusat-pusat pertumbuhan baru seperti kawasan pendidikan di Desa Telang Kecamatan Kamal, perkembangan masing-masing Ibu Kota Kecamatan dan pusat pertumbuhan ekonomi lainnya.

2. Kawasan Agropolitan

Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis

Kawasan pengembangan agropolitan di Kabupaten Bangkalan meliputi Kecamatan Socah-Burneh-Bangkalan (SOBURBANG), Kecamatan Socah

sebagai pusat Kota Tani di Kawasan Agropolitan SOBURBANG (disebut Kota Tani Utama), sedangkan Kecamatan Burneh dan Bangkalan merupakan Hinterland dari kawasan tersebut.

Dengan adanya pengembangan kawasan strategis, memerlukan adanya perhatian khusus bidang kesehatan utamanya preventif dan kuratif yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan yang cukup memadai.

Selain kawasan strategis tersebut diatas, hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan yaitu **Kawasan Rawan Bencana**. Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang di indikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Di Kabupaten Bangkalan, kawasan rawan bencana di kelompokkan :

1. Kawasan rawan banjir, yang meliputi: Kecamatan Blega, Kwanyar, Modung, Tanjung Bumi, Socah dan Sepulu
2. Kawasan rawan longsor, yang meliputi : Kecamatan Kokop, Geger, Galis, Klampis, Tanjung Bumi, Burneh dan Konang
3. Kawasan rawan puting beliung, yang meliputi : Kecamatan Tanjung Bumi, Sepulu, Geger, Kwanyar, Tragah, Burneh, dan Bangkalan
4. Kawasan rawan abrasi, yang meliputi : Kecamatan Tanjung Bumi, Sepulu, Klampis, Arosbaya, Modung, Kwanyar, Bangkalan, Socah, Kamal
5. Kawasan rawan kekeringan, yang meliputi : Kecamatan Kokop, Tragah, Konang, Galis, Labang, dan Tanah Merah

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan puskesmas, sejumlah puskesmas telah ditingkatkan fungsinya menjadi puskesmas dengan tempat perawatan sebanyak 22 puskesmas. Puskesmas perawatan ini terutama yang beralokasi jauh dari Rumah Sakit, di jalur-jalur jalan raya yang rawan kecelakaan serta di wilayah yang terpencil.

Sasaran yang ingin dicapai dari analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah memberikan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

### **3.4. PENENTUAN ISU STRATEGIS**

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan cara pandang (*mindset*) dari paradigma sakit ke paradigma sehat.

Namun demikian, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, beberapa masalah dan tantangan baru muncul sebagai akibat dari perubahan sosial ekonomi serta perubahan lingkungan strategis global dan kondisi internal/eksternal organisasi. Tantangan global antara lain adalah pencapaian sasaran SDGs, sedangkan pada lingkup kondisi internal Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal organisasi (peluang dan ancaman) dapat diidentifikasi agar dapat membantu menentukan kebijakan dan strategis yang tepat dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal organisasi (peluang dan ancaman) dapat diidentifikasi agar dapat membantu menentukan kebijakan dan strategis yang tepat dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan yang diharapkan.

#### **1. Analisa Lingkungan Internal**

Analisa terhadap lingkungan internal Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan yang memperlihatkan kekuatan dan kelemahan organisasi adalah sebagai berikut :

Adanya kelembagaan yang jelas, kejelasan kewenangan Direktur RSUD (Unit Organisasi Bersifat Khusus), Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan (Puskesmas), sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, kinerja aparat dan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat ditingkatkan serta dukungan Program Kesehatan yang ditunjang dengan adanya Standar pelayanan Minimal (SPM) merupakan kekuatan yang harus dipertahankan untuk mencapai indikator kinerja pelayanan.

Adapun adanya faktor pendukung seperti pemberian motivasi, pengetahuan dan keterampilan dari tenaga kesehatan yang masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan, serta jumlah/kwantitas tenaga medis dan paramedis yang masih perlu ditambah serta aktivitas kinerja dan

koordinasi dilapangan merupakan kelemahan yang mendasar dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Selain itu diperlukan waktu yang cukup untuk menyesuaikan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020, Rumah Sakit sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dan Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dan persiapan pelaksanaan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2022, juga menjadi tugas Dinas Kesehatan yang membutuhkan perhatian dan persiapan yang baik.

## **2. Analisa Lingkungan Eksternal**

Kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas sarana pelayanan yang meningkat, jumlah pelayanan kesehatan swasta yang memadai, terdapatnya Polindes , Poskesdes/ Ponkesdes, Posyandu, Desa Siaga Aktif dan Kader Kesehatan Aktif yang tersedia di setiap desa merupakan peluang yang harus dimanfaatkan.

Sedangkan rendahnya kesadaran masyarakat, krisis ekonomi yang berkepanjangan yang melemahkan warga masyarakat secara financial, sehingga mengakibatkan meningkatnya keluarga Miskin (Gakin) merupakan ancaman yang harus segera diatasi dalam mencapai Visi dan Misi RPJPD Bangkalan.

## **3. Faktor Penentu Keberhasilan**

Adapun yang menjadi faktor penentu dalam pencapaian keberhasilan di bidang kesehatan antara lain:

- a. Membudayakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan intervensi program – program pendukung lainnya.
- b. Meningkatkan mutu/kualitas pelayanan kesehatan dengan percepatan peningkatan kompetensi dan memaksimalkan tenaga kesehatan yang ada dan dukungan peran serta masyarakat.
- c. Meningkatkan intensitas pemahaman kepada masyarakat tentang kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu.
- d. Mencukupi kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia yang bermutu.
- e. Memperbaiki manajemen kesehatan untuk mengatasi berbagai masalah agar prasarana dan sarana kesehatan dapat dimanfaatkan secara optimal.

- f. Mengaktifkan dan memanfaatkan serta meningkatkan kemitraan dengan organisasi- organisasi yang ada dalam rangka tercapainya program kesehatan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, telaah RTRW dan KLHS Kabupaten Bangkalan maka dapat ditentukan ***isu strategis*** sebagai berikut :

- 1. Belum optimalnya kualitas dan distribusi tenaga kesehatan**
- 2. Belum optimalnya manajemen dan mutu pelayanan kesehatan**
- 3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standart**
- 4. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi**
- 5. Belum optimalnya penanganan masalah gizi dan masih ditemukan kasus stunting**
- 6. Masih rendahnya masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat dan adanya masalah kesehatan lingkungan**
- 7. Masih tingginya angka kesakitan yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular**

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN**

---

#### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS KESEHATAN**

##### **4.1.1 Tujuan**

Untuk mewujudkan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dengan menentukan tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) akan menjadi tujuan Dinas Kesehatan, yaitu ***meningkatkan derajat kesehatan masyarakat***

##### **4.1.2. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yaitu berupa result (hasil) yang ingin dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan sehingga harus jelas, dapat diukur, bisa dicapai, berorientasi hasil, dan memiliki rentang waktu pencapaian. Berikut ini ***sasaran*** pembangunan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan :

#### **1. Meningkatkan mutu pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat**

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase pelayanan fasilitas kesehatan yang sesuai standar
- b. Persentase meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
- c. Survey Kepuasan Masyarakat

#### **2. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kesehatan**

Dengan indikator sasaran:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan
- c. Nilai SAKIP RSUD Syamrabu
- d. Cost Recovery Rate (CRR)

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan**

TUJUAN						SASARAN							
URAIAN	INDIKATOR	TARGET				URAIAN	INDIKATOR	TARGET					
		2024	2025	2026	Transisi 2027			2024	2025	2026	Transisi 2027		
<b>Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</b>	<b>Angka Harapan Hidup (AHH)</b>	71,00	71,33	71,5	71,5	1	Meningkatnya mutu pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat	a.	Persentase pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%
								B	Persentase meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	80%	80%	80%	80%
								C	Survey Kepuasan Masyarakat	88,31%	88,5%	88,7%	88,7%
						2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kesehatan	a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	80
								B	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	70	72	75	75
								C	Nilai SAKIP RSUD	64	70	70	70
								D	Cost Recovery Rate (CRR)	100%	100%	100%	100%

**4.2. CASCADING KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN**

**Tabel 4.2**

**Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan**

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				PAGU DINKES					284.127.073.951		273.463.612.774		273.463.612.774
				PAGU RSUD					364.031.051.388		325.059.833.657		325.059.833.657
	Angka Harapan Hidup (AHH)							71,00		71,33		71,50	
		Persentase Pelayanan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standart						100%		100%		100%	
		Persentase Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat						80%		80%		80%	
			Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakredit					100%	32.203.482.100	100%	33.594.968.000	100%	33.594.968.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			asi Utama-Paripurna										
				Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Disediakan									
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun			2 Unit	11.865.240.000	1 unit	8.000.000.000	1 unit	8.000.000.000
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			1 Unit	740.000.000	1 Unit	550.000.000	1 Unit	550.000.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya			5 unit	1.000.000.000	19 unit	5.602.010.000	19 unit	5.602.010.000
				<b>Persentase Terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>									
					Jumlah dokumen hasil Pengelolaan			20 dokumen	7.140.000	20 dokumen	50.000.000	20 dokumen	50.000.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pelayanan Kesehatan Tradisional . Akupuntur . Asuhan Mandiri. dan Tradisional Lainnya								
					Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Arosbaya			1 dokumen	823.372.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000
					Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Bangkalan			1 dokumen	820.704.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000
					Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Blega			1 dokumen	800.217.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Banjar			1 dokumen	893.670.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000
					Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Burneh			1 dokumen	899.782.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000
					Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Galis			1 dokumen	908.106.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000
					Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Geger			1 dokumen	903.319.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000
					Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Jaddih			1 dokumen	700.823.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Kamal			1 dokumen	802.492.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000
					Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Kedundung			1 dokumen	803.152.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000
					Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Klampis			1 dokumen	903.706.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000
					Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Kokop			1 dokumen	763.023.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000
					Jumlah dokumen operasional pelayanan			1 dokumen	834.949.000	1 dokumen	872.000.000	1 dokumen	872.000.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					puskesmas Konang								
					Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Kwanyar			1 dokumen	930.101.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000
					Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Modung			1 dokumen	711.532.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000
					Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Sepulu			1 dokumen	907.831.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000
					Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Socah			1 dokumen	600.415.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000
					Jumlah dokumen operasional pelayanan			1 dokumen	754.031.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					puskesmas Sukolilo								
					Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Tanah Merah			1 dokumen	908.592.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000
					Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Tanjung Bumi			1 dokumen	875.482.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000
					Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Tonggoh			1 dokumen	786.680.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000
					Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Tragah			1 dokumen	785.431.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			2 dokumen	15.450.000	2 dokumen	97.152.000	2 dokumen	97.152.000
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			1 Unit	268.734.700	1 Unit	65.000.000	1 Unit	65.000.000
				<b>Persentase Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan</b>				<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				secara Terintegrasi									
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan			1 dokumen	29.950.650	1 dokumen	10.806.000	1 dokumen	10.806.000
				<b>Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pada Dinas Kesehatan</b>				<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan			19 unit	10.000.000	19 unit	10.000.000	19 unit	10.000.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya								
					Jumlah Fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan			36 unit	29.556.750	18 unit	10.000.000	18 unit	10.000.000
					Jumlah Dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan			2 dokumen	120.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					kesehatan rujukan								
			<b>Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan /Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart</b>					70%	8.953.604.272	80%	13.198.398.165	100%	13.198.398.165
				<b>Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Disediakan</b>									
					Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang			51 unit	2.871.167.465	469 unit	1.087.108.165	469 unit	1.087.108.165

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan								
					Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar			507 unit	433.757.000	500 unit	360.452.000	500 unit	360.452.000
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman			258 Paket	5.490.638.307	250 Paket	11.085.491.000	250 Paket	11.085.491.000



No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<b>Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>									
					Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			19305 Orang	9.915.000	19305 Orang	50.000.000	19305 Orang	50.000.000
					Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			19265 Orang	16.650.000	19265 Orang	176.728.000	19265 Orang	176.728.000
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 dokumen	197.040.000	1 dokumen	274.770.000	1 dokumen	274.770.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Angka Kematian Bayi (AKB)					32,33	273.526.129	31,33	100.000.000	31,0	100.000.000
				Persentase Terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									
					Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			18848 Orang	262.150.629	18848 Orang	50.000.000	18848 Orang	50.000.000
					Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar			84840 Orang	11.375.500	84840 Orang	50.000.000	84840 Orang	50.000.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Prevalensi Stunting					14%	441.349.000	12%	359.194.000	11%	359.194.000
				Persentase Terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									
					jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			146163 Orang	19.015.000	146163 Orang	50.000.000	146163 Orang	50.000.000
					jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan			1 dokumen	131.700.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000





No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<b>Kabupaten/ Kota</b>									
					jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			728938 Orang	22.195.000	728938 Orang	40.000.000	728938 Orang	40.000.000
					Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			56410 Orang	23.305.000	56410 Orang	40.000.000	56410 Orang	40.000.000
					Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan			14958 Orang	1.752.333.446	14958 Orang	45.000.000	14958 Orang	45.000.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					pelayanan kesehatan sesuai standar								
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar			2095 Orang	36.405.000	2095 Orang	25.000.000	2095 Orang	25.000.000
					jumlah orang terduga menderit tuberkolosis yang mendapat pelayanan sesuai standar			16542 Orang	1.496.832.200	16542 Orang	25.000.000	16542 Orang	25.000.000
					jumlah orang terduga menderit			17280 Orang	223.170.100	17280 Orang	25.000.000	17280 Orang	25.000.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					HIV yang mendapat pelayanan sesuai standar								
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			70 orang	86.716.000	30 orang	25.000.000	30 orang	25.000.000
					Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular			2 dokumen	1.711.548.382	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			100 orang	6.468.336	100 orang	25.000.000	100 orang	25.000.000



No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			1 dokumen	220.343.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			-	0	1 dokumen	28.024.000	1 dokumen	28.024.000	

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan			3 dokumen	2.328.387.500	3 dokumen	1.529.138.000	3 dokumen	1.529.138.000
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			2 Dokumen	168.700.000	2 Dokumen	210.297.000	2 Dokumen	210.297.000
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			-	0	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000
					Jumlah Spesimen Penyakit			1 paket	31.240.000	1 paket	302.218.000	1 paket	302.218.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan								
					Jumlah laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 laporan	141.260.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000
					jumlah dokumen hasil pelaksanaan			1 dokumen	26.110.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					kewaspadaan dini dan respon wabah								
			<b>Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</b>					100%	48.969.144.968	100%	54.258.378.477	100%	54.258.378.477
				<b>Persentase Terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>									
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan			2 dokumen	48.969.144.968	2 dokumen	54.258.378.477	2 dokumen	54.258.378.477

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					masyarakat								
		Survey Kepuasan Masyarakat						88,31 %		88,50 %		88,70 %	
			Prosentase pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD)					100%	10.500.000.000	100%	6.000.000.000	100%	6.000.000.000
				Ketersediaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit (RSUD)									
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan			-	0	1 Unit	2.539.627.693	1 Unit	2.539.627.693



No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				wilayah Kabupaten/ Kota (Dinas Kesehatan)									
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000
					Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)			347 orang	6.671.785.182	347 orang	6.103.100.000	347 orang	6.103.100.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan			2 Dokumen	160.989.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000
				<b>Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>									
					Jumlah SDM Kesehatan yang menjadi sasaran pengembangan mutu			400 Orang	1.312.566.900	200 Orang	575.944.000	200 Orang	575.944.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					dan peningkatan kompetensi teknis								
			Prosentase Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (RSUD)					100%	1.754.200.000	100%	1.675.800.000	100%	1.675.800.000
				Prosentase tercapainya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM (RSUD)									
					Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi			114 Orang	1.754.200.000	114 Orang	1.675.800.000	114 Orang	1.675.800.000



No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>									
					jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan			2 Dokumen	81.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000



No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<b>Rumah Tangga</b>									
					Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh			3 dokumen	212.282.500	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Industri Rumah Tangga								
				<b>Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>									
					jumlah produk dan sarana produksi makanan-minuman industri rumah tangga beredar yang			70 unit	197.348.500	10 unit	25.000.000	10 unit	25.000.000



No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<b>Kabupaten/ Kota</b>									
					jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			3 dokumen	182.243.500	3 dokumen	521.728.100	3 dokumen	521.728.100
				<b>Prosentase pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>									
					jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan			1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					dan gerakan hidup bersih dan sehat								
				Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			3 dokumen	52.000.000	3 dokumen	51.969.000	3 dokumen	51.969.000	
		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>						<b>75</b>		<b>78</b>		<b>80</b>	

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nilai SAKIP DINKES						70		72		75	
			Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					80	175.740.055.553	80	161.520.124.132	80	161.520.124.132
				Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinkes)									
					Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			4 dokumen	14.662.200	4 dokumen	10.724.650	4 dokumen	10.724.650
					Jumlah dokumen RKA-SKPD dan			2 dokumen	12.604.750	2 dokumen	14.298.750	2 dokumen	14.298.750





No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<b>dinas kesehatan</b>									
					Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD			1 laporan	2.800.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000
					Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD			-	-	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000
				<b>Prosentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Dinas Kesehatan</b>									
					Jumlah dokumen Monitoring,			1 dokumen	5.000.000	-	0	-	0









No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Arosbaya			1 unit	2.998.102.880	1 unit	2.852.076.919	1 unit	2.852.076.919
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Bangkalan			1 unit	3.963.374.058	1 unit	4.085.744.300	1 unit	4.085.744.300
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan			1 unit	1.990.813.166	1 unit	1.907.900.000	1 unit	1.907.900.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					pada Puskesmas Banjar								
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Blega			1 unit	6.350.743.028	1 unit	5.679.391.864	1 unit	5.679.391.864
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Burneh			1 unit	3.681.971.711	1 unit	3.322.604.896	1 unit	3.322.604.896
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan			1 unit	4.504.985.124	1 unit	3.667.279.650	1 unit	3.667.279.650

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Galis								
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Geger			1 unit	6.143.441.865	1 unit	5.387.264.000	1 unit	5.387.264.000
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Jaddih			1 unit	2.117.302.714	1 unit	1.892.806.712	1 unit	1.892.806.712
					Jumlah BLUD yang			1 unit	4.174.944.307	1 unit	3.655.780.890	1 unit	3.655.780.890

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Kamal								
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Kedundung			1 unit	3.002.415.923	1 unit	2.976.394.506	1 unit	2.976.394.506
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada			1 unit	3.985.582.813	1 unit	3.440.614.451	1 unit	3.440.614.451

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Puskesmas Klampis								
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Kokop			1 unit	5.969.236.083	1 unit	5.341.727.332	1 unit	5.341.727.332
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Konang			1 unit	5.639.982.503	1 unit	4.352.500.000	1 unit	4.352.500.000
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan			1 unit	4.859.345.241	1 unit	4.433.902.846	1 unit	4.433.902.846

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					penunjang pelayanan pada Puskesmas Kwanyar								
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Modung			1 unit	2.172.196.482	1 unit	1.901.537.756	1 unit	1.901.537.756
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Sepulu			1 unit	3.852.159.810	1 unit	3.361.986.845	1 unit	3.361.986.845
					Jumlah BLUD yang menyediakan			1 unit	2.429.662.921	1 unit	2.196.695.250	1 unit	2.196.695.250

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					an pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Socah								
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Sukolilo			1 unit	3.304.188.219	1 unit	2.620.000.000	1 unit	2.620.000.000
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas T. Merah			1 unit	5.781.434.387	1 unit	4.971.110.010	1 unit	4.971.110.010

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Tanjung Bumi			1 unit	3.286.895.100	1 unit	3.035.690.674	1 unit	3.035.690.674
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Tongguh			1 unit	1.729.846.935	1 unit	1.150.890.333	1 unit	1.150.890.333
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang			1 unit	2.318.840.922	1 unit	2.095.699.060	1 unit	2.095.699.060

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					pelayanan pada Puskesmas Tragah								
		Nilai SAKIP RSUD						64		70		70	
		COST RECOVERY RATE (CRR)						100%		100%		100%	
			Indeks Kepuasan Layanan Penunjang RSUD					80	351.776.851.388	80	317.384.033.657	80	317.384.033.657
				Prosentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ( RSUD )									
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (RSUD)			502 Orang/Bulan	22.598.687.904	501 Orang/Bulan	32.643.731.316	501 Orang/Bulan	32.643.731.316

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Outcome (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Prosentase pelayanan BLUD RSUD yang terlaksana									
				Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada RSUD				1 Unit Kerja	329.178.163.484	1 Unit Kerja	284.740.302.341	1 Unit Kerja	284.740.302.341

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN

---

#### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

##### 5.1. Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

- i. Meningkatkan mutu fasilitas kesehatan masyarakat melalui Akreditasi
- ii. Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui peningkatan sumber daya kesehatan, peningkatan kefarmasian dan alat kesehatan dan perbekalan bahan medis habis pakai
- iii. Meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat melalui peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan
- iv. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa melalui deteksi dini dan peningkatan surveilans penyakit
- v. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat

##### 5.2. Kebijakan

Dari strategi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- i. Strategi **“Meningkatkan mutu fasilitas kesehatan masyarakat melalui Akreditasi”** yaitu dengan arah kebijakan :
  - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- ii. Strategi **“Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui peningkatan sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan”** yaitu dengan arah kebijakan :
  - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- iii. Strategi **“Meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat melalui peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan”** yaitu dengan arah kebijakan :
  - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- iv. Strategi **“Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa melalui deteksi dini dan peningkatan surveilans penyakit”** yaitu dengan arah kebijakan :
  - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - b. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
  - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- v. Strategi **“Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat”** yaitu dengan arah kebijakan :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**TABEL 5.1**

**Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan**

<b>Isu Strategis :</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kualitas dan distribusi tenaga kesehatan</li> <li>2. Belum optimalnya manajemen dan mutu pelayanan kesehatan</li> <li>3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standart</li> <li>4. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi</li> <li>5. Belum optimalnya penanganan masalah gizi dan masih ditemukan kasus stunting</li> <li>6. Masih rendahnya masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat dan adanya masalah kesehatan lingkungan</li> <li>7. Masih tingginya angka kesakitan yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular</li> </ol>					
<b>Tujuan RPD :</b> Meningkatkan kualitas sumber daya manusia					
<b>Sasaran RPD :</b> Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					
<b>Tujuan Renstra</b>	<b>Sasaran Renstra</b>		<b>Strategi</b>		<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1.Meningkatnya mutu pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat	1.1	Meningkatkan mutu fasilitas kesehatan masyarakat melalui Akreditasi	1.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a
				1.1.2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				1.1.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		1.2	Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui peningkatan sumber daya kesehatan, peningkatan kefarmasian dan alat kesehatan serta	1.2.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				1.2.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

			perbekalan bahan medis habis pakai	1.2.3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
				1.2.4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		1.3	Meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat melalui peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan	1.3.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				1.3.1	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		1.4	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa melalui deteksi dini dan peningkatan surveilans penyakit	1.4.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				1.4.2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	2.Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kesehatan	2.1	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat	2.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

---

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta memperhatikan strategi dan kebijakan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan telah menyusun rencana program pada Renstra tahun 2024 – 2026.

Rencana program Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan pada hakekatnya merupakan implementasi dari “**Arah Kebijakan**” Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan untuk mencapai Tujuan, Sasaran dan Strategi yang telah disusun dengan menyesuaikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026, serta mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang ada. Rencana Program juga merupakan penjabaran dari tugas pokok serta fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan untuk mendukung tercapainya Program Prioritas Kabupaten Bangkalan di bidang kesehatan.

Pelaksanaan rencana program Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan pada tahun 2024-2026 ini dititikberatkan pada program utama Dinas Kesehatan yang digariskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam Peraturan Bupati No 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan yang meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Dari program utama diatas, maka perlu dijabarkan kedalam **Kegiatan** dan **Sub Kegiatan** pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan antara lain :

#### **1. Semua Urusan Pemerintahan**

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
  - 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan tanggapan pemeriksaan
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- h. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
  - 2) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Arosbaya
  - 3) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Bangkalan
  - 4) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Banjar
  - 5) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Blega
  - 6) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Burneh
  - 7) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Galis
  - 8) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Geger
  - 9) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Jaddih
  - 10) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kamal
  - 11) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kedundung
  - 12) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Klampis
  - 13) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kokop
  - 14) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Konang
  - 15) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kwanyar
  - 16) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Modung

- 17) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Sepulu
- 18) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Socah
- 19) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Sukolilo
- 20) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tanah Merah
- 21) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tanjung Bumi
- 22) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tongguh
- 23) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tragah

## **2. Urusan Kesehatan**

### **1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

- a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Pembangunan Puskesmas
  - 2) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
  - 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
  - 4) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - 5) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - 6) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
  - 7) Pengadaan Obat, Vaksin
  - 8) Pengadaan Bahan Habis Pakai
  - 9) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
  - 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

- 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
  - 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
  - 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
  - 6) Pengelolaan Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus
  - 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
  - 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
  - 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
  - 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
  - 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
  - 12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
  - 13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
  - 14) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
  - 15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
  - 2) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
  - 3) Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
- d. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
  - 2) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- e. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Arosbaya
  - 2) Pengadaan Obat, Vaksin pada Puskesmas Arosbaya
  - 3) Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Puskesmas Arosbaya

- 4) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Bangkalan
- 5) Pengadaan Obat, Vaksin pada Puskesmas Bangkalan
- 6) Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Puskesmas Bangkalan
- 7) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Banjar
- 8) Pengadaan Obat, Vaksin pada Puskesmas Banjar
- 9) Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Puskesmas Banjar
- 10) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Blega
- 11) Pengadaan Obat, Vaksin pada Puskesmas Blega
- 12) Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Puskesmas Blega
- 13) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Burneh
- 14) Pengadaan Obat, Vaksin pada Puskesmas Burneh
- 15) Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Puskesmas Burneh
- 16) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Galis
- 17) Pengadaan Obat, Vaksin pada Puskesmas Galis
- 18) Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Puskesmas Galis
- 19) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Geger
- 20) Pengadaan Obat, Vaksin pada Puskesmas Geger
- 21) Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Puskesmas Geger
- 22) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Jaddih
- 23) Pengadaan Obat, Vaksin pada Puskesmas Jaddih
- 24) Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Puskesmas Jaddih
- 25) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kamal
- 26) Pengadaan Obat, Vaksin pada Puskesmas Kamal
- 27) Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Puskesmas Kamal
- 28) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kedundung
- 29) Pengadaan Obat, Vaksin pada Puskesmas Kedundung
- 30) Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Puskesmas Kedundung

- 31) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Klampis
- 32) Pengadaan Obat, Vaksin pada Puskesmas Klampis
- 33) Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Puskesmas Klampis
- 34) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kokop
- 35) Pengadaan Obat, Vaksin pada Puskesmas Kokop
- 36) Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Puskesmas Kokop
- 37) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Konang
- 38) Pengadaan Obat, Vaksin pada Puskesmas Konang
- 39) Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Puskesmas Konang
- 40) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kwanyar
- 41) Pengadaan Obat, Vaksin pada Puskesmas Kwanyar
- 42) Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Puskesmas Kwanyar
- 43) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Modung
- 44) Pengadaan Obat, Vaksin pada Puskesmas Modung
- 45) Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Puskesmas Modung
- 46) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Sepulu
- 47) Pengadaan Obat, Vaksin pada Puskesmas Sepulu
- 48) Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Puskesmas Sepulu
- 49) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Socah
- 50) Pengadaan Obat, Vaksin pada Puskesmas Socah
- 51) Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Puskesmas Socah
- 52) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Sukolilo
- 53) Pengadaan Obat, Vaksin pada Puskesmas Sukolilo
- 54) Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Puskesmas Sukolilo
- 55) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tanah Merah
- 56) Pengadaan Obat, Vaksin pada Puskesmas Tanah Merah
- 57) Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Puskesmas Tanah Merah

- 58) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tanjung Bumi
  - 59) Pengadaan Obat, Vaksin pada Puskesmas Tanjung Bumi
  - 60) Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Puskesmas Tanjung Bumi
  - 61) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tongguh
  - 62) Pengadaan Obat, Vaksin pada Puskesmas Tongguh
  - 63) Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Puskesmas Tongguh
  - 64) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tragah
  - 65) Pengadaan Obat, Vaksin pada Puskesmas Tragah
  - 66) Pengadaan Bahan Habis Pakai pada Puskesmas Tragah
- f. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Operasional Pelayanan Puskesmas pada Puskesmas Arosbaya
  - 2) Operasional Pelayanan Puskesmas pada Puskesmas Bangkalan
  - 3) Operasional Pelayanan Puskesmas pada Puskesmas Banjar
  - 4) Operasional Pelayanan Puskesmas pada Puskesmas Blega
  - 5) Operasional Pelayanan Puskesmas pada Puskesmas Burneh
  - 6) Operasional Pelayanan Puskesmas pada Puskesmas Galis
  - 7) Operasional Pelayanan Puskesmas pada Puskesmas Geger
  - 8) Operasional Pelayanan Puskesmas pada Puskesmas Jaddih
  - 9) Operasional Pelayanan Puskesmas pada Puskesmas Kamal
  - 10) Operasional Pelayanan Puskesmas pada Puskesmas Kedundung
  - 11) Operasional Pelayanan Puskesmas pada Puskesmas Klampis
  - 12) Operasional Pelayanan Puskesmas pada Puskesmas Kokop
  - 13) Operasional Pelayanan Puskesmas pada Puskesmas Konang
  - 14) Operasional Pelayanan Puskesmas pada Puskesmas Kwanyar
  - 15) Operasional Pelayanan Puskesmas pada Puskesmas Modung
  - 16) Operasional Pelayanan Puskesmas pada Puskesmas Sepulu
  - 17) Operasional Pelayanan Puskesmas pada Puskesmas Socah
  - 18) Operasional Pelayanan Puskesmas pada Puskesmas Sukolilo
  - 19) Operasional Pelayanan Puskesmas pada Puskesmas Tanah Merah
  - 20) Operasional Pelayanan Puskesmas pada Puskesmas Tanjung Bumi
  - 21) Operasional Pelayanan Puskesmas pada Puskesmas Tongguh

22) Operasional Pelayanan Puskesmas pada Puskesmas Tragah

**2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

- a. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
- b. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - 2) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
  - 3) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- c. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

**3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**

- a. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- b. Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
- c. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk

Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk
- d. Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
- e. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
  - 2) Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga

#### **4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

- a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Kegiatan Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- c. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dan sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka arah kebijakan dan kebijakan pembiayaan pembangunan daerah dituntut lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta berorientasi pada Kinerja.

Kebijakan pengelolaan belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026, diarahkan :

- a. Belanja Daerah diarahkan untuk pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan publik;
- b. Belanja Daerah diprioritaskan untuk pembangunan Bidang Kesehatan dengan didukung oleh bidang kewenangan lainnya;
- c. Belanja Daerah dikelola dengan prinsip Ekonomis, Efisien, Efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan Asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat .

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka rancangan anggaran berdasarkan prediksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2024-2026 disusun untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan di Bidang Kesehatan. Oleh karena itu agar usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lebih realistis dan terukur, maka penyusunan rencana kerja dan program indikatif perlu adanya penentuan indikasi pagu, sehingga diperlukan tolok ukur dan analisis yang jelas dengan melihat proporsi terhadap total anggaran pembangunan.

Adapun indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif dari program dan kegiatan diatas pada kurun waktu Tahun 2024-2026 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini :

**Tabel 6.1**  
**Capaian Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				PAGU DINKES			284.127. 073.951		273.463. 612.774		273.463. 612.774		273.463. 612.774		
				PAGU RSUD			364.031. 051.388		325.059. 833.657		325.059. 833.657		325.059. 833.657		
Menin gkatka n Deraja t Keseh atan Masya rakat	Menin gkatn ya Mutu Pelaya nan dan Kualit as Keseh atan	1. Persen tase Pelaya nan Fasilita s Keseha tan Sesuai	1.02 .02	PROGRA M PEMENUH AN UPAYA KESEHAT AN PERORAN GAN DAN UPAYA KESEHAT AN		100%	99.446.8 02.816	100%	104.555. 747.542	100%	104.555. 747.542	100%	104.555. 747.542	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Masyarakat	Standart 2. <i>Persentase Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat</i>		MASYARAKAT											
					Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna	100%	32.203.482.100	100%	33.594.968.000	100%	33.594.968.000	100%	33.604.968.000		
		3. <i>Survey Kepuasan Masyarakat</i>			Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/ Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan	70%	8.953.604.272	80%	13.198.398.165	100%	13.198.398.165	100%	13.198.398.165		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					BMHP) sesuai Standart										
					Angka Kematian Ibu (AKI)	4,4	223.605.000	4,2	501.498.000	4,0	501.498.000	4,0	501.498.000		
					Angka Kematian Bayi (AKB)	32,3	273.526.129	31,3	100.000.000	31,0	100.000.000	31,0	100.000.000		
					Prevalensi Stunting	14%	441.349.000	12%	359.194.000	11%	359.194.000	11%	359.194.000		
					Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan Lansia	100%	18.750.000	100%	54.608.000	100%	54.608.000	100%	54.608.000		
					Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	100%	5.358.973.464	100%	275.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Menular dan Tidak Menular										
					Terlaksanan ya Upaya peningkatan Kesehatan	100%	3.004.36 7.883	100%	2.213.70 2.900	100%	2.213.70 2.900	100%	2.213.70 2.900		
					Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	14%	48.969.1 44.968	15%	54.258.3 78.477	16%	54.258.3 78.477	16%	54.258.3 78.477		
					Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD)	100%	10.500.0 00.000	100%	6.000.00 0.000	100%	6.000.00 0.000	100%	6.000.00 0.000	RSU D	RSUD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1.0 2.0 2.2. 01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Disediakan	100%	22.647.171.655	100%	27.454.434.065	100%	27.454.434.065	100%	27.454.434.065	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
				Ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit (RSUD)		100%	10.500.000.000	100%	6.000.000.000	100%	6.000.000.000	1	6.000.000.000	RSUD	
			1.02. .02. 2.01. .000 2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	11.865.240.000	1 unit	8.000.000.000	1 unit	8.000.000.000	1 unit	8.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	740.000.000	1 Unit	550.000.000	1 Unit	550.000.000	1 Unit	550.000.000		
			1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-	0	1 Unit	2.539.627.693	1 Unit	2.539.627.693	1 Unit	2.539.627.693	RSUD	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	5 unit	1.000.000.000	19 unit	5.602.010.000	19 unit	5.602.010.000	19 unit	5.602.010.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	51 unit	2.871.167.465	469 unit	1.087.108.165	469 unit	1.087.108.165	469 unit	1.087.108.165	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (RSUD)	63 unit	10.500.000.000	6 unit	3.460.372.307	6 unit	3.460.372.307	6 unit	3.460.372.307	RSUD	
			1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	507 unit	433.757.000	500 unit	360.452.000	500 unit	360.452.000	500 unit	360.452.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1.02.02.2.01.002.3	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minumandi Fasilitas Kesehatan yang disediakan	258 Paket	5.490.638.307	250 Paket	11.085.491.000	250 Paket	11.085.491.000	250 Paket	11.085.491.000		
			1.02.02.2.01.002.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatanny aoleh Tenaga	1464 Keluarga	88.327.383	1464 keluarga	104.025.900	1464 keluarga	104.025.900	1464 keluarga	104.025.900		

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Kesehatan Puskesmas										
			1.02 .02. 2.01 .002 6	Distribusi Alat Kesehatan , Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan MedisHabisP akai,Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1Paket	158.041. 500	1 paket	665.347. 000	1 paket	665.347. 000	1 paket	665.347. 000		
			<b>1.0 2.0 2.2. 02</b>	<b>Penyediaa n Layanan Kesehata n untuk</b>	<b>Persentase Terlaksanan ya Layanan Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>76.610.1 23.761</b>	<b>100%</b>	<b>76.970.5 07.477</b>	<b>100%</b>	<b>76.970.5 07.477</b>	<b>100%</b>	<b>76.970.5 07.477</b>	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				<b>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupate n/Kota</b>	<b>untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>										
			1.02 .02. 2.02 .000 1	Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar	19305 Orang	9.915.00 0	19305 Orang	50.000.0 00	19305 Orang	50.000.0 00	19305 Orang	50.000.0 00	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			1.02 .02. 2.02 .000 2	Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar	19265 Orang	16.650.0 00	19265 Orang	176.728. 000	19265 Orang	176.728. 000	19265 Orang	176.728. 000	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			1.02 .02.	Pengelolaa n Pelayanan	Jumlah Bayi baru lahir yang	18848 Orang	262.150. 629	18848 Orang	50.000.0 00	18848 Orang	50.000.0 00	18848 Orang	50.000.0 00	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2.02.000.000.003	Kesehatan Bayi Baru Lahir	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar										
			1.02.02.000.000.004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	84840 Orang	11.375.500	84840 Orang	50.000.000	84840 Orang	50.000.000	84840 Orang	50.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.000.000.005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	146163 Orang	19.015.000	146163 Orang	50.000.000	146163 Orang	50.000.000	146163 Orang	50.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.000.000.008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	jumlah penduduk usia produktif	728938 Orang	22.195.000	728938 Orang	40.000.000	728938 Orang	40.000.000	728938 Orang	40.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			.000 6	pada Usia Produktif	yang mendapatka n pelyanan kesehatan sesuai standar										
			1.02 .02. 2.02 .000 7	Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatka n pelyanan kesehatan sesuai standar	13095 6 Orang	18.750.0 00	13095 6 Orang	54.608.0 00	13095 6 Orang	54.608.0 00	13095 6 Orang	<b>54.608.0 00</b>	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			1.02 .02. 2.02 .000 8	Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatka n pelyanan kesehatan sesuai standar	56410 Orang	23.305.0 00	56410 Orang	40.000.0 00	56410 Orang	40.000.0 00	56410 Orang	40.000.0 00	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14958 Orang	1.752.333.446	14958 Orang	45.000.000	14958 Orang	45.000.000	14958 Orang	45.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	2095 Orang	36.405.000	2095 Orang	25.000.000	2095 Orang	25.000.000	2095 Orang	25.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	jumlah orang terduga menderita tuberkolosis yang	16542 Orang	1.496.832.200	16542 Orang	25.000.000	16542 Orang	25.000.000	16542 Orang	25.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			.001 1	Terduga Tuberkulo sis	mendapat pelayanan sesuai standar										
			1.02 .02. 2.02 .001 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapat pelayanan sesuai standar	17280 Orang	223.170. 100	17280 Orang	25.000.0 00	17280 Orang	25.000.0 00	17280 Orang	25.000.0 00	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			1.02 .02. 2.02 .001 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian	1 dokum en	220.343. 000	1 dokum en	10.000.0 00	1 dokum en	10.000.0 00	1 dokum en	10.000.0 00	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Luar Biasa (KLB)										
			1.02 .02. 2.02 .001 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 dokum en	131.700. 000	1 dokum en	50.000.0 00	1 dokum en	50.000.0 00	1 dokum en	50.000.0 00	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			1.02 .02. 2.02 .001 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	0	1 dokum en	28.024.0 00	1 dokum en	28.024.0 00	1 dokum en	28.024.0 00		
			1.02 .02. 2.02 .001 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	3 dokum en	2.328.38 7.500	3 dokum en	1.529.13 8.000	3 dokum en	1.529.13 8.000	3 dokum en	1.529.13 8.000,00	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					kesehatan lingkungan										
			1.02.02.20018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	6 dokumen	290.634.000	6 dokumen	259.194.000	6 dokumen	259.194.000	6 dokumen	259.194.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.20019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupunktur. Asuhan Mandiri. dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupunktur. Asuhan Mandiri. dan Tradisional Lainnya	20 dokumen	7.140.000	20 dokumen	50.000.000	20 dokumen	50.000.000	20 dokumen	50.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.	Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	2 Dokumen	168.700.000	2 Dokumen	210.297.000	2 Dokumen	210.297.000	2 Dokumen	210.297.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2.02 .002 0	Surveilans Kesehatan	Surveilans Kesehatan										
			1.02 .02. 2.02 .002 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgun a NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	70 orang	86.716.0 00	30 orang	25.000.0 00	30 orang	25.000.0 00	30 orang	25.000.0 00		
			1.02 .02. 2.02 .002 4	Pengelolaan Upaya Pengurang an Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	-	0	1 dokum en	10.000.0 00	1 dokum en	10.000.0 00	1 dokum en	10.000.0 00		
			1.02 .02.	Pelayanan Kesehatan Penyakit	Jumlah dokumen hasil	2 dokum en	1.711.54 8.382	2 dokum en	25.000.0 00	2 dokum en	25.000.0 00	2 dokum en	25.000.0 00	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2.02.002.5	Menular dan Tidak Menular	pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular										
			1.02.02.2.02.002.6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	2 dokumen	48.969.144.968	2 dokumen	54.258.378.477	2 dokumen	54.258.378.477	2 dokumen	54.258.378.477	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.2.02.002.8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	1 paket	31.240.000	1 paket	302.218.000	1 paket	302.218.000	1 paket	302.218.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Rujukan/ Nasional											
			1.02.02.003.003	Operasional Pelayanan Puskesmas Arosbaya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	823.372.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.003.003	Operasional Pelayanan Puskesmas Bangkalan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	820.704.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.003.003	Operasional Pelayanan Puskesmas Banjar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	800.217.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.003.003	Operasional Pelayanan Puskesmas Blega	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	893.670.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1.02.02.003.003	Operasional Pelayanan Puskesmas Burneh	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	899.782.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.003.003	Operasional Pelayanan Puskesmas Galis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	908.106.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.003.003	Operasional Pelayanan Puskesmas Geger	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	903.319.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.003.003	Operasional Pelayanan Puskesmas Jaddih	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	700.823.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.003.003	Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional	1 dokumen	802.492.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			.0033	Puskesmas Kamal	Pelayanan Puskesmas										
			1.02.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas Kedundung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	803.152.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas Klampis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	903.706.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas Kokop	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	763.023.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.0033	Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional	1 dokumen	834.949.000	1 dokumen	872.000.000	1 dokumen	872.000.000	1 dokumen	872.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			.0033	Puskesmas Konang	Pelayanan Puskesmas										
			1.02.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas Kwanyar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	930.101.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas Modung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	711.532.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas Sepulu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	907.831.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas Socah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	600.415.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1.02.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas Sukolilo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	754.031.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas Tanah Merah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	908.592.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas Tanjung Bumi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	875.482.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas Tongguh	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	786.680.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	1 dokumen	868.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1.02 .02. 2.02 .003 3	Operasion al Pelayanan Puskesmas Tragah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokum en	785.431. 000	1 dokum en	868.000. 000	1 dokum en	868.000. 000	1 dokum en	868.000. 000	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			1.02 .02. 2.02 .003 4	Operasion al Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 dokum en	15.450.0 00	2 dokum en	97.152.0 00	2 dokum en	97.152.0 00	2 dokum en	97.152.0 00		
			1.02 .02. 2.02 .003 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapka n (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian	Jumlah laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan	1 lapora n	141.260. 000	1 lapora n	10.000.0 00	1 lapora n	10.000.0 00	1 lapora n	10.000.0 00	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Obat Massal)	Pemberian Obat Massal)										
			1.02 .02. 2.02 .003 7	Pelaksana an Kewaspada an Dini dan Respon Wabah	jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	1 dokum en	26.110.0 00	1 dokum en	10.000.0 00	1 dokum en	10.000.0 00	1 dokum en	10.000.0 00	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			1.02 .02. 2.02 .003 8	Penyediaa n dan Pengelolaa n Sistem Penangana n Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat	1 Unit	268.734. 700	1 Unit	65.000.0 00	1 Unit	65.000.0 00	1 Unit	65.000.0 00		

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Darurat Terpadu (SPGDT)										
			1.02 .02. 2.02 .004 2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 orang	6.468.336	100 orang	25.000.000	100 orang	25.000.000	100 orang	25.000.000		
			1.02 .02. 2.02 .004 6	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 dokumen	197.040.000	1 dokumen	274.770.000	1 dokumen	274.770.000	1 dokumen	274.770.000		
			<b>1.0 2.0 2.2. 03</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>Persentase Terselenggaraanya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>29.950.650</b>	<b>100%</b>	<b>10.806.000</b>	<b>100%</b>	<b>10.806.000</b>	<b>100%</b>	<b>10.806.000</b>	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1.02 .02. 2.03 .000 2	Pengelolaa n Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 dokum en	29.950.6 50	1 dokum en	10.806.0 00	1 dokum en	10.806.0 00	1 dokum en	10.806.0 00	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			<b>1.0 2.0 2.2. 04</b>	<b>Penerbita n Izin Rumah Sakit Kelas C. D dan Fasilitas Pelayanan Kesehata n Tingkat Daerah Kabupate n/Kota</b>	<b>Persentase Terlaksanan ya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pada Dinas Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>159.556. 750</b>	<b>100%</b>	<b>120.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>120.000. 000</b>		<b>120.000. 000</b>	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	19 unit	10.000.000	19 unit	10.000.000	19 unit	10.000.000	19 unit	10.000.000		
			1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator	36 unit	29.556.750	18 unit	10.000.000	18 unit	10.000.000	18 unit	10.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan										
			1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	2 dokumen	120.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek (SIP)</b>	<b>70%</b>	<b>8.155.341.082</b>	<b>80%</b>	<b>6.729.044.000</b>	<b>90%</b>	<b>6.729.044.000</b>	<b>90%</b>	<b>6.729.044.000</b>	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				KESEHATAN											
					Prosentase Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	100%	1.754.200.000	100%	1.675.800.000	100%	1.675.800.000	100%	1.675.800.000	RSUD	
			1.0 2.0 3.2. 02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	Persentase Terpenuhiya kebutuhan dan pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/ Kota	100%	6.842.774.182	100%	6.153.100.000	100%	6.153.100.000	100%	6.153.100.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				<b>Kabupaten/Kota</b>											
					<b>Prosentase tercapainya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM (RSUD)</b>	<b>100%</b>	<b>1.754.200.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.675.800.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.675.800.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.675.800.000</b>	<b>RSUD</b>	
			1.02 .03. 2.02 .000 1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	<b>2 dokumen</b>	<b>25.000.000</b>		
			1.02 .03. 2.02 .000 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang	347 orang	6.671.785.182	347 orang	6.103.100.000	347 orang	6.103.100.000	347 orang	6.103.100.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Manusia Kesehatan sesuai Standar	memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)										
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (RSUD)	114 Orang	1.754.20 0.000	114 Orang	1.675.80 0.000	114 Orang	1.675.80 0.000	114 Orang	1.675.80 0.000	<b>RSU D</b>	
			1.02 .03. 2.02 .000 3	Pembinaa n dan Pengawasa n Sumber Daya	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan	2 Doku men	160.989. 000	2 Doku men	25.000.0 00	2 Doku men	25.000.0 00	2 Doku men	25.000.0 00		

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Manusia Kesehatan	sumber daya manusia kesehatan										
			<b>1.0 2.0 3.2. 03</b>	<b>Pengemban gan Mutu dan Peningkat an Kompeten si Teknis Sumber Daya Manusia Kesehata n Tingkat Daerah Kabupate n/ Kota</b>	<b>Persentase Terlaksanan ya Pengembang an Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>1.312.56 6.900</b>	<b>100%</b>	<b>575.944. 000</b>	<b>100%</b>	<b>575.944. 000</b>	<b>100%</b>	<b>575.944. 000</b>		
			1.02 .03. 2.03 .000 1	Pengemban gan Mutu dan Peningkat	Jumlah SDM Kesehatan yang menjadi sasaran pengembang	400 Orang	1.312.56 6.900	200 Orang	575.944. 000	200 Orang	575.944. 000	200 Orang	575.944. 000		

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				an Kompetens i Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	an mutu dan peningkatan kompetensi teknis										
			1.0 2.0 4	<b>PROGRA M SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHAT AN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Persentase Pengawasan dan Pengendalia n Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) serta</b>	<b>92%</b>	<b>490.631. 000</b>	<b>95%</b>	<b>75.000.0 00</b>	<b>98%</b>	<b>75.000.0 00</b>	<b>98%</b>	<b>75.000.0 00</b>	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					<b>Industri Rumah Tangga (IRT) yang telah Tervalidasi Perijinan</b>										
			1.02 .04. 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisiona l (UMOT)	Persentase Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	<b>100%</b>	<b>81.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			1.02 .04. 2.01 .000 2	Penyediaa n dan Pengelolaa n Data Perizinan	jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan,	2 Doku men	81.000.000	1 doku men	25.000.000	1 doku men	25.000.000	1 doku men	25.000.000	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan



Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			<b>1.0 2.0 4.2. 03</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduks i oleh Industri</b>	Persentase terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	<b>100%</b>	212.282.500	<b>100%</b>	25.000.000	<b>100%</b>	25.000.000	<b>100%</b>	25.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				<b>Rumah Tangga</b>											
			1.02 .04. 2.03 .000 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	3 dokum en	212.282. 500	1 dokum en	25.000.0 00	1 dokum en	25.000.0 00	1 dokum en	25.000.0 00	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga										
			1.02 .04. 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri	<b>Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	100%	197.348.500	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Rumah Tangga											
			1.02 .04. 2.06 .000 1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	jumlah Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar yang dilakukan pemeriksaan Post Market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	70 unit	197.348. 500	10 unit	25.000.0 00	10 unit	25.000.0 00	10 unit	25.000.0 00	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			<b>1.0 2.0 5</b>	<b>PROGRA M PEMBERD</b>	<b>Persentase Unit Kesehatan</b>	<b>85%</b>	<b>294.243. 500</b>	<b>90%</b>	<b>583.697. 100</b>	<b>100%</b>	<b>583.697. 100</b>	<b>100%</b>	<b>583.697. 100</b>	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				AYAAN MASYARA KAT BIDANG KESEHAT AN	Berbasis Masyarakat (UKBM) yang diBina										
			1.0 2.0 5.2. 01	Advokasi. Pemberda yaan. Kemitraa n. Peningkat an Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupate n/Kota	Prosentase Advokasi, Pemberdaya an, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	75%	182.243. 500	75%	521.728. 100	75%	521.728. 100	75%	521.728. 100	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1.02 .05. 2.01 .000 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan . Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 dokumen	182.243. 500	3 dokumen	521.728. 100	3 dokumen	521.728. 100	3 dokumen	521.728. 100	Dinas Kesehatan	Kab Bangk alan
			<b>1.0 2.0 5.2. 02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>80%</b>	60.000.0 00	<b>80%</b>	<b>10.000.0 00</b>	<b>80%</b>	<b>10.000.0 00</b>	<b>80%</b>	10.000.0 00	Dinas Kesehatan	Kab Bangk alan
			1.02 .05. 2.02	Penyelenggaraan Promosi	Jumlah Dokumen Hasil	1 dokumen	60.000.0 00	1 dokumen	10.000.0 00	1 dokumen	10.000.0 00	1 dokumen	10.000.0 00	Dinas Kesehatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			.000 1	Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelengga aan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat										
			<b>1.0 2.0 5.2. 02</b>	<b>Pengemban gan dan Pelaksana an Upaya Kesehata n Bersumbe r Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupate n/Kota</b>	Persentase Pengembang an dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100%	<b>52.000.0 00</b>	100%	51.969.0 00	100%	51.969.0 00	1	51.969.0 00		
			1.02 .05. 2.03	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengemba	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	3 dokum en	52.000.0 00	3 dokum en	51.969.0 00	3 dokum en	51.969.0 00	3 dokum en	51.969.0 00		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			.0001	ngan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)										
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Kesehatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	1.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	175.740.055.553	100%	161.520.124.132	100%	161.520.124.132	100%	161.520.124.132	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan	
				Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah	100%	351.776.851.388	100%	317.384.033.657	100%	317.384.033.657	100%	317.384.033.657	RSUD		

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peranga t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Daerah (RSUD)										
		3. Nilai SAKIP RSUD	1.02 .01. 2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan . Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	38.253.9 50	100%	42.273.4 00	100%	42.273.4 00	100%	42.273.4 00	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
		3. Cost Recovery Rate (CRR)	1.02 .01. 2.01 .000 1	Penyusunan Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokum en	14.662.2 00	4 dokum en	10.724.6 50	4 dokum en	10.724.6 50	4 dokum en	10.724.6 50	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			1.02 .01. 2.01	Koordinasi dan Penyusun an	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan	2 dokum en	12.604.7 50	2 dokum en	14.298.7 50	2 dokum en	14.298.7 50	2 dokum en	14.298.7 50	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			.000 2	Dokumen RKA-SKPD	hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD										
			1.02 .01. 2.01 .000 4	Koordinasi dan Penyusun an DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dokum en	3.782.00 0	2 dokum en	4.250.00 0	2 dokum en	4.250.00 0	2 dokum en	4.250.00 0	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			1.02 .01. 2.01 .000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 lapora n	7.205.00 0	4 lapora n	13.000.0 00	4 lapora n	13.000.0 00	4 lapora n	13.000.0 00	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			<b>1.0 2.0 1.2. 02</b>	<b>Administ rasi Keuangan</b>	<b>Persentase Terlaksanan ya Administrasi</b>	<b>100%</b>	<b>89.695.3 44.352</b>	<b>100%</b>	<b>85.696.1 59.838</b>	<b>100%</b>	<b>85.696.1 59.838</b>	<b>100%</b>	<b>85.696.1 59.838</b>	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Keuangan Perangkat Daerah</b>										
					<b>Prosentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ( RSUD )</b>	<b>100%</b>	<b>22.598.687.904</b>	<b>100%</b>	<b>32.643.731.316</b>	<b>100%</b>	<b>32.643.731.316</b>	<b>100%</b>	<b>32.643.731.316</b>	RSUD	
			1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1275 orang/bulan	89.690.339.102	1275 orang/bulan	85.691.359.838	1275 orang/bulan	85.691.359.838	1275 orang/bulan	85.691.359.838	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (RSUD)	502 Orang/Bulan	22.598.687.904	501 Orang/Bulan	32.643.731.316	501 Orang/Bulan	32.643.731.316	501 Orang/Bulan	32.643.731.316	RSUD	

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1.02 .01. 2.02 .000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 laporan	5.005.250	18 laporan	4.800.000	18 laporan	4.800.000	18 laporan	4.800.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02 .01. 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah pada dinas kesehatan</b>	100%	2.800.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	2.800.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000		
			1.02.01.2.05	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Prosentase terpenuhinya administrasi kepegawaian pada Dinas Kesehatan</b>	100%	5.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	5.000.000	-	0	-	0	-	0,00	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			<b>1.02.01.2.06.0006</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>8.000.000</b>	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	2.500.000	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000,00	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	0 laporan	0,00	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000,00	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Konsultasi SKPD	dan Konsultasi SKPD										
			<b>1.0 2.0 1.2. 07</b>	<b>Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksanan ya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>232.276. 150</b>	<b>100%</b>	<b>580.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>580.000. 000</b>	<b>1</b>	<b>580.000. 000</b>		
			1.02 .01. 2.07 .000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	59.000.0 00	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	0,00		
			1.02 .01. 2.07	Pengadaan Sarana dan	JumlahUnit Sarana danPrasaran	1 unit	173.276. 150	1 unit	580.000. 000	1 unit	580.000. 000	1 unit	580.000. 000,00		

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			.001 0	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	a Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan										
			<b>1.0 2.0 1.2. 08</b>	<b>Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah</b>	<b>100%</b>	<b>518.126. 509</b>	<b>100%</b>	<b>787.336. 110</b>	<b>100%</b>	<b>787.336. 110</b>	<b>100%</b>	<b>787.336. 110</b>	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			1.02 .01. 2.08 .000 2	Penyediaa n Jasa Komunika si. Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang disediakan	15 lapora n	300.779. 774	15 lapora n	542.801. 500	15 lapora n	542.801. 500	15 lapora n	542.801. 500,00	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1.02 .01. 2.08 .000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 lapora n	217.346. 735	12 lapora n	244.534. 610	12 lapora n	244.534. 610	12 lapora n	244.534. 610	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			<b>1.0 2.0 1.2. 09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksanan ya Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>988.288. 400</b>	<b>100%</b>	<b>66.756.4 90</b>	<b>100%</b>	<b>66.756.4 90</b>	<b>100%</b>	<b>66.756.4 90</b>	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			1.02 .01. 2.09 .000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	30 unit	97.878.3 00	15 unit	33.528.2 40	15 unit	33.528.2 40	15 unit	33.528.2 40,00	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya										
			1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	890.410.100	1 unit	33.228.250	1 unit	33.228.250	1 unit	33.228.250,00	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			<b>1.0</b>	<b>Peningkatan</b>	<b>Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>84.257.466.192</b>	<b>100%</b>	<b>74.329.598.294</b>	<b>100%</b>	<b>74.329.598.294</b>	<b>100%</b>	<b>74.329.598.294</b>	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			<b>1.2.10</b>	<b>Pelayanan BLUD</b>	<b>Prosentase pelayanan BLUD RSUD</b>	<b>100%</b>	<b>329.178.163.484</b>	<b>100%</b>	<b>284.740.302.341</b>	<b>100%</b>	<b>284.740.302.341</b>	<b>100%</b>	<b>284.740.302.341</b>	RSUD	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					yang terlaksana										
			1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD (RSUD)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	329.178.163.484	1 Unit Kerja	284.740.302.341	1 Unit Kerja	284.740.302.341	1 Unit Kerja	284.740.302.341		
			1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Arosbaya	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	1 unit	2.998.102.880	1 unit	2.852.076.919	1 unit	2.852.076.919	1 unit	2.852.076.919	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang	1 unit	3.963.374.058	1 unit	4.085.744.300	1 unit	4.085.744.300	1 unit	4.085.744.300	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Puskesmas Bangkalan	elayanan pada Puskesmas										
			1.02 .01. 2.10 .000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Banjar	Jumlah BLUD yang menyediakan elayanan dan penunjang elayanan pada Puskesmas	1 unit	1.990.81 3.166	1 unit	1.907.90 0.000	1 unit	1.907.90 0.000	1 unit	1.907.90 0.000	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			1.02 .01. 2.10 .000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Blega	Jumlah BLUD yang menyediakan elayanan dan penunjang elayanan pada Puskesmas	1 unit	6.350.74 3.028	1 unit	5.679.39 1.864	1 unit	5.679.39 1.864	1 unit	5.679.39 1.864	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			1.02 .01. 2.10	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang menyediakan	1 unit	3.681.97 1.711	1 unit	3.322.60 4.896	1 unit	3.322.60 4.896	1 unit	3.322.60 4.896	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			.000 1	Pelayanan BLUD pada Puskesmas Burneh	pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas										
			1.02 .01. 2.10 .000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Galis	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	1 unit	4.504.98 5.124	1 unit	3.667.27 9.650	1 unit	3.667.27 9.650	1 unit	3.667.27 9.650	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			1.02 .01. 2.10 .000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Geger	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	1 unit	6.143.44 1.865	1 unit	5.387.26 4.000	1 unit	5.387.26 4.000	1 unit	5.387.26 4.000	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1.02 .01. 2.10 .000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Jaddih	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	1 unit	2.117.30 2.714	1 unit	1.892.80 6.712	1 unit	1.892.80 6.712	1 unit	1.892.80 6.712	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			1.02 .01. 2.10 .000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kamal	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	1 unit	4.174.94 4.307	1 unit	3.655.78 0.890	1 unit	3.655.78 0.890	1 unit	3.655.78 0.890	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			1.02 .01. 2.10 .000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang	1 unit	3.002.41 5.923	1 unit	2.976.39 4.506	1 unit	2.976.39 4.506	1 unit	2.976.39 4.506	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Puskesmas Kedundung	elayanan pada Puskesmas										
			1.02 .01. 2.10 .000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Klampis	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	1 unit	3.985.58 2.813	1 unit	3.440.61 4.451	1 unit	3.440.61 4.451	1 unit	3.440.61 4.451	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			1.02 .01. 2.10 .000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kokop	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	1 unit	5.969.23 6.083	1 unit	5.341.72 7.332	1 unit	5.341.72 7.332	1 unit	5.341.72 7.332	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1.02 .01. 2.10 .000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Konang	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	1 unit	5.639.98 2.503	1 unit	4.352.50 0.000	1 unit	4.352.50 0.000	1 unit	4.352.50 0.000	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			1.02 .01. 2.10 .000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kwanyar	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	1 unit	4.859.34 5.241	1 unit	4.433.90 2.846	1 unit	4.433.90 2.846	1 unit	4.433.90 2.846	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			1.02 .01. 2.10 .000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang	1 unit	2.172.19 6.482	1 unit	1.901.53 7.756	1 unit	1.901.53 7.756	1 unit	1.901.53 7.756	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Puskesmas Modung	elayanan pada Puskesmas										
			1.02 .01. 2.10 .000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Sepulu	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	1 unit	3.852.15 9.810	1 unit	3.361.98 6.845	1 unit	3.361.98 6.845	1 unit	3.361.98 6.845	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02 .01. 2.10 .000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Socah	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	1 unit	2.429.66 2.921	1 unit	2.196.69 5.250	1 unit	2.196.69 5.250	1 unit	2.196.69 5.250	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan
			1.02 .01. 2.10	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang menyediakan	1 unit	3.304.18 8.219	1 unit	2.620.00 0.000	1 unit	2.620.00 0.000	1 unit	2.620.00 0.000	Dinas Kesehatan	Kab Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			.000 1	Pelayanan BLUD pada Puskesmas Sukolilo	pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas										
			1.02 .01. 2.10 .000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tanah Merah	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	1 unit	5.781.43 4.387	1 unit	4.971.11 0.010	1 unit	4.971.11 0.010	1 unit	4.971.11 0.010	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			1.02 .01. 2.10 .000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tanjung Bumi	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	1 unit	3.286.89 5.100	1 unit	3.035.69 0.674	1 unit	3.035.69 0.674	1 unit	3.035.69 0.674	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output) (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pera ngka t Daer ah Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1.02 .01. 2.10 .000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tongguh	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	1 unit	1.729.84 6.935	1 unit	1.150.89 0.333	1 unit	1.150.89 0.333	1 unit	1.150.89 0.333	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan
			1.02 .01. 2.10 .000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tragah	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	1 unit	2.318.84 0.922	1 unit	2.095.69 9.060	1 unit	2.095.69 9.060	1 unit	2.095.69 9.060	Dinas Kese hatan	Kab Bangk alan

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KESEHATAN

Rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran yang ada pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026. Disamping itu juga tidak lepas dari Indikator-indikator bidang kesehatan yang berpedoman pada Standart Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan serta Dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026. yang telah ditetapkan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan menitikberatkan peningkatan kinerja pelayanan Kesehatan dengan indikator kinerja sebagai berikut ini:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan**  
**yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran**  
**RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		(Tahun 2023)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Indikator Tujuan :</b> Angka Harapan Hidup	73,29	71,00	71,33	71,5	71,5
1	<b>Indikator Sasaran :</b> Persentase pelayanan Fasilitas Kesehatan sesuai standart	-	100%	100%	100%	100%
2	Persentase meningkatnya	75%	80%	80%	80%	80%

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		(Tahun 2023)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
	kualitas kesehatan masyarakat					
3	Survey Kepuasan Masyarakat	87,79%	88,31%	88,5%	88,7%	88,7%
4	Indeks kepuasan Masyarakat	74,71	75	78	80	80
5	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	61,46	70	72	75	75
6	Nilai SAKIP RSUD Syamrabu	63,1	64	70	70	70
7	Cost Recovery Rate (CRR)	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan**  
**Tahun 2024-2026**

NO	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		(Tahun 2023)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk		12%	15%	18%	18%
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi		86%	86%	86%	86%
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100%	100%	100%	100%
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		98%	99%	100%	100%
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100%	100%	100%	100%
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		98%	98%	98%	98%
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		80%	85%	90%	90%
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		60%	70%	80%	80%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		70%	75%	80%	80%
10	Persentase penderita hipertensi yang		100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		(Tahun 2023)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100%	100%	100%	100%
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		100%	100%	100%	100%
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

---

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan perkembangan isu strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap Bidang Kesehatan.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 memuat Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2024 – 2026 akan digunakan untuk melakukan Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan.

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 ini, telah memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan seperti yang diamanatkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan juga telah mengakomodir rencana implementasi Permendagri 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang telah diterapkankan pada 22 Puskesmas di Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2022. Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan dapat dihasilkan dengan baik diantaranya meliputi: peningkatan pencegahan KKN, penataan kelembagaan, penataan dan peningkatan kapasitas SDM, serta peningkatan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan berbagai perubahan sesuai paradigma tersebut, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif, maka pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan dapat dilakukan secara sistemik, bertahap, dan berkesinambungan guna mewujudkan *good governance*, untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang mempunyai tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pokok pembangunan sesuai Tugas dan Fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026.

2. Seluruh jajaran di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan harus melaksanakan program – program dalam Renstra dengan sebaik - baiknya. Termasuk UOBK yang diatur dalam Peraturan Bupati No 85 Tahun 2020 dan UPT yang diatur dalam Peraturan Bupati No 86 Tahun 2020.
3. Sebagai Pedoman menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 sehingga merupakan suatu dokumen yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Inpres Nomor: 7 tahun 1999 yang diwajibkan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyusunnya secara berjenjang.

Dengan tersusunnya Perubahan Renstra ini diharapkan kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangkalan dapat terwujud sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan 2024-2026. Pada akhirnya, tidak lupa disampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini.

Bangkalan, 16 Desember 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANGKALAN**



**Hj. NUR HOTIBAH, S.ST.Bd.M.MKES**

Pembina Tk. I

NIP. 19700709/199102 2 001